PEMERINTAH KOTA TERNATE
INSPEKTORAT
Jalan Jati (Perumnas) No. 222 Telp. (0921) 3128069
Fax. (0921) 3128592 *e-mail*: inspektoratkt@gmail.com
TERNATE Kode Pos: 97716

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Kota Ternate.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Ternate, 29 Maret 2016

Inspektur

PEMERINTAH KOTA TERNATE
INSPEKTORAT

Mohd. Taufik Djauhar, S.E., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660208 198902 1 001

PEMERINTAH KOTA TERNATE

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015, disusun berpedoman pada Perjanjian Kinerja Walikota Ternate Tahun 2015. Perjanjian Kinerja Walikota Ternate tersebut disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate Tahun 2011-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate Tahun 2015. Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015, dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagaimana yang diwajibkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Pemerintah Kota Ternate yang diukur dan dievaluasi dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015 adalah kinerja sasaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja Walikota Ternate Tahun 2015. Hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata capaian sasaran Tahun 2015 yaitu sebesar **100,72%.**

Dari 11 (sebelas) sasaran pada perjanjian kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015, semuanya mencapai hasil optimal ≥ 85%. Capaian kinerja 11 (sebelas) sasaran strategis Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	CAPAIAN
1	Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	100,22%
2	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	95,50%
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	101,13%
4	Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	98,42%
5	Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	101,84%

6	Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	106,09%
7	Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	112,38%
8	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	101,09%
9	Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	94,64%
10	Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	100,80%
11	Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	95,84%

Jumlah indikator kinerja sasaran Tahun 2015 sebanyak 82 indikator, 74 (tujuh puluh empat) indikator sasaran (90,24%) mencapai nilai optimal ≥85,00% dan hanya 8 (delapan) indikator sasaran (9,76%) yang nilai capaiannya kurang optimal <85,00%, yaitu:

1. Angka partisipasi kasar, nilai capaian rata-rata 79,74%;
2. Angka kematian kasar (per 100.000 penduduk), nilai capaian 77,22%;
3. Angka kesembuhan penderitaTB Paru, nilai capaian 84,62%;
4. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, nilai capaian 62,54%;
5. Persentase Kecamatan bebas rawan gizi, nilai capaian 71,42%;
6. Rasio penderita Malaria terhadap jumlah penduduk (Annual Malaria Incidence dan Annual parasite incidence), nilai capaian 37,26%;
7. Persentase PNS yang diberikan sanksi berat, nilai capaian 53,06%;
8. Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan, nilai capaian 82,93%.

Kelemahan tersebut di atas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan

guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Ternate, 30 Maret 2016

Wakil Walikota Ternate

H. ABDULLAH TAHIR, S.H.

DAFTAR ISI

Hal

IKHTISAR EKSEKUTIF ---------- i
DAFTAR ISI ---------- iv

BAB I PENDAHULUAN ---------- 1
A. LATAR BELAKANG ---------- 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ---------- 1
C. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE ---------- 2
D. ORGANISASI ---------- 5
E. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2015 ---------- 6
F. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 ---------- 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA ---------- 13

A. RENCANA STRATEGIS ---------- 13
a. Visi ---------- 13
b. Misi ---------- 15
c. Permasalahan dan isu-isu pembangunan ---------- 15
d. Tujuan ---------- 20
e. Sasaran ---------- 22
f. Sasaran Prioritas Program Pembangunan Tahun 2015 29
g. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 ---------- 29

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ---------- 32

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ---------- 38

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ---------- 38
a. Penetapan Kategori Nilai Capaian ---------- 38
b. Pengukuran Kinerja ---------- 38

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA ---------- 48
C. TREND CAPAIAN KINERJA ---------- 74
D. REALISASI ANGGARAN ---------- 76

BAB IV P E N U T U P ---------- 82
L a m p i r a n

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaporan merupakan fase yang sangat penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen moderen, pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan instrumen untuk evaluasi guna perbaikan manajemen itu sendiri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap penyelengarah pemerintahan membuat laporan kinerja setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporankinerjatersebutmerupakanbentukakuntabilitasdaripelaksanaantugasdanfungsi yangdipercayakankepadasetiapinstansipemerintahataspenggunaananggaran. BentuklaporankinerjadiaturdalamPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kota Ternate sebagai daerah otonom, mempunyai hak untuk menyelenggarakan otonomi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan. Salah satu media pertanggungjawaban tersebut adalah melalui Laporan Kinerja yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

PenyusunanLaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Ternate Tahun 2015 dimaksudkanuntukmengkomunikasikancapaiankinerjaorganisasiPemerintah Kota Ternate dalamsatutahunanggaran yang dikaitkandengan proses pencapaianindikatorsasaran yang telahditetapkan.

TujuanpenyusunanLaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Ternate adalahsebagaisaranadalammenyampaikanpertanggungjawabkankinerjaPemerintah Kota Ternate kepadaseluruh stakeholders ataspelaksanaantugas,

fungsidankewenanganpengelolaansumberdaya yang telahdipercayakankepadaPemerintah Kota Ternate.

C. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE

a. Yuridis

Secara yuridis peningkatan status Kota Ternate dari Kota Administratif Ternate menjadi Kotamadya Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1999 Tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate.Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administratif dibagi menjadi 3 Kecamatan dan terdiri dari 58 Desa/Kelurahan. Dinamika pelaksanaan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang ditandai perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan pertimbangan rentang kendali pemerintahan, wilayah tertentu dimana perkembangannya dipandang memungkinkan untuk ditingkatkan status administrasinya seperti Moti, terkait dengan itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Moti yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Sebagai konsekuensi pelaksanaan Perda dimaksud, 4 (empat) Desa yang ada di Moti dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah dimekarkannya 2 (dua) Kelurahan di Batang Dua, Kecamatan Pulau Ternate menjadi 5 (lima) Kelurahan, melalui Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Lelewi, Bido dan Pantai Sagu.

Selanjutnya pada akhir tahun 2007 Kota Ternate dimekarkan menjadi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti dan Kecamatan Batang Dua dan 11 (sebelas) kelurahan baru yang dimekarkan pada tahun 2007. Pada tahun 2009 dibentuk Kecamatan Hiri dan dilakukan pemekaran kelurahan baru sebanyak 3 (tiga) kelurahan.

Tabel:Wilayah Kecamatan & Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Ternate Utara	14
2	Ternate Tengah	15
3	Ternate Selatan	17
4	Pulau Ternate	13
5	M o t i	6
6	Hiri	6
7	Batang Dua	6
Jumlah		77

b. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

Wilayah Kota Ternate terletak pada 0˚-2˚ Lintang Utara dan126˚-128˚ Bujur Timur. Luas wilayah Kota Ternate adalah 5.795,40 Km² dan didominasi oleh wilayah laut 5.547,55 Km² sedangkan luas daratan 162,03 Km². Kota Ternate berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera; dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku.

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

1. Pulau Ternate
2. Pulau Hiri
3. Pulau Moti
4. Pulau Mayau
5. Pulau Tifure

6. Pulau Maka
7. Pulau Mano
8. Pulau Gurida

Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate

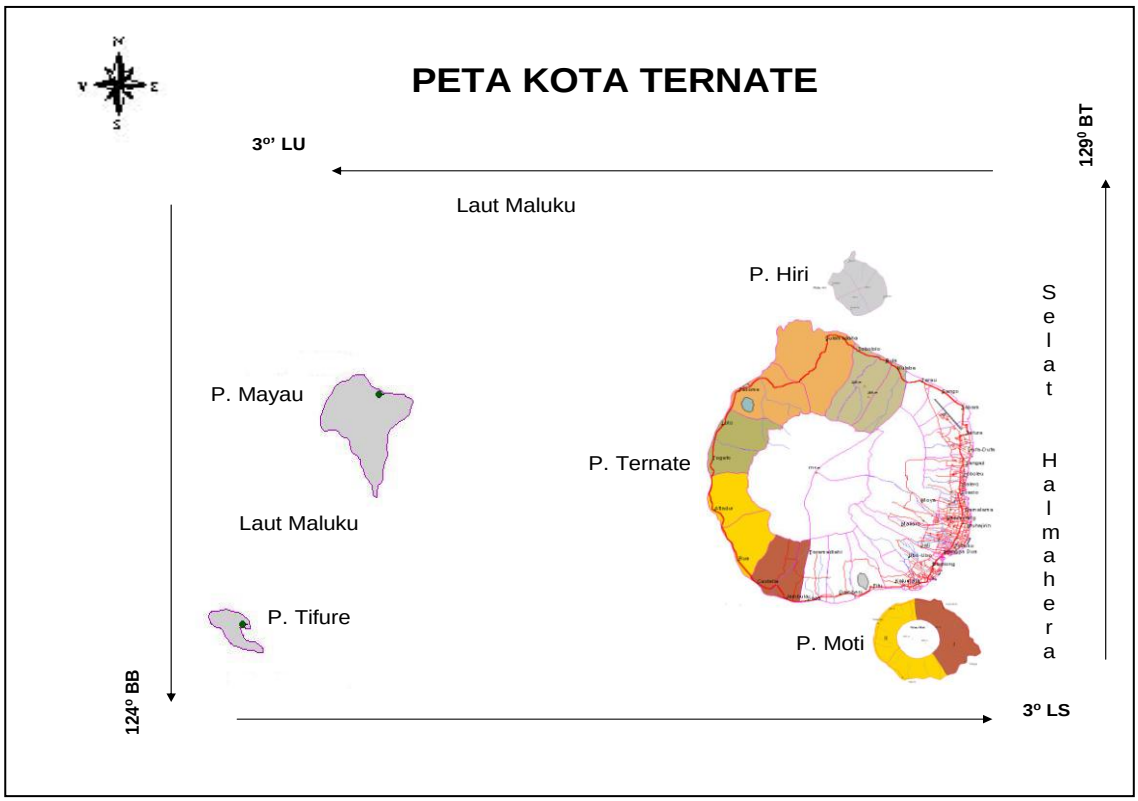

c. Topografi

Sebagian besar Kota Ternate adalah daerah bergunung, berbukit, dan terdiri dari pulau vulkanis, karang dengan kondisi jenis tanah sebagai berikut:

1. *Rogusal*:

   - Pulau Ternate
   - Hiri
   - Moti

2. *Rensika*:

- Pulau Mayau
- Pulau Tifure
- Pulau Maka
- Pulau Mano
- Pulau Gurida

d. Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis yang terdiri dari dua musim (*Utara-Barat* dan *Timur-Selatan*) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi: lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau, 5 pulau yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan pulau Tifure didiami penduduk, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak berpenghuni.

e. Demografis

Sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data dari BPS Kota Ternate tahun 2014 sebanyak 207.789jiwa. Penduduk tersebut tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Wilayah Kecamatan TernateSelatan 71.476 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Utara 50.887 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Tengah 58.698 jiwa, Wilayah Kecamatan Pulau Ternate 16.209 jiwa, Wilayah Kecamatan Moti 4.814 jiwa, Wilayah Kecamatan Batang Dua 2.712 jiwa, Wilayah Kecamatan Hiri 3.003 jiwa.

D. ORGANISASI

Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, sampai dengan akhir tahun 2015 Pemerintah Kota Ternate telah membentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

1) 1 (satu) Sekretariat Daerah;

2) 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3) 17 (tujuh belas) organisasi Dinas Daerah;
4) 8 (delapan) organisasi Badan Daerah;
5) 1 (satu) Inspektorat;
6) 4 (empat) organisasi Kantor;
7) 3 (tiga) Perusahaan Daerah;
8) 7 (tujuh) organisasi Pemerintah Kecamatan;
9) 77 (tujuh puluh tujuh) Pemerintah Kelurahan.

E. PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Prioritas Pembangunan Kota Ternate tahun 2015 diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor:13Tahun 2014Tanggal 5 Mei 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2015. Program Prioritas Pembangunan Kota Ternate adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan dan penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
   a. Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah pada Kecamatan-Kecamatan di luar kawasan perkotaan.
   b. Pemerataan pelayanan air bersih pada kawasan dataran tinggi di Pulau Ternate dan pada Kecamatan di luar Ternate (Hiri, Moti dan batang Dua).
   c. Pemerataan pelayanan Listrik pada Kelurahan yang tidak terjangkau layanan PLN, melalui sumber energi alternatif lainnya.
2. **Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
   a. Memperbaiki Sarana Pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan.
   b. Mewujudkan Pendidikan Dasar yang berkualitas dengan mengalokasi dana penunjang kegiatan sekolah melalui APBD untuk menutupi kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah.
   c. Menyediakan Buku Pelajaran di Perpustakaan Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengurangi Beban Orang Tua Siswa.
   d. Memfasilitasi dan Membantu Guru untuk Mendapatkan Gelar S1.

e. Memberikan Beasiswa kepada Pelajar Berprestasi mulai SD, SMP, SMA, yang diprioritaskan pada siswa dari Warga Kurang Mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten.
f. Memberikan Beasiswa kepada Guru Berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah.
g. Memberikan Insentif kepada Guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.

3. **Mewujudkan Kesehatan Murah,Terjangkau dan Berkualitas,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
   a. Perbaikan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan dokter dan Tenaga Keperawatan, serta Obat-obatan pada setiap Puskesmas/Pustu/Polindes, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
   b. Memberikan insentif kepada Bidan Desa atau tenaga Kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.
   c. Memberikan Beasiswa kepada Dokter, Tenaga Medis Putra/Putri Daerah Berprestasi terutama dari Keluarga Kurang Mampu untuk melanjutkan ke jenjang Spesialis atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
   d. Pelayanan Jamkeda, secara efektif, tepat sasaran, pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin, dengan pengawasan dan evaluasi berkala agar penyelenggarannya terus diperbaiki.
   e. Menetapkan kebijakan subsidi silang; setiap pasien rawat inap pengguna fasilitas VIP, Kelas I dan Kelas II, mensubsidi pasien kurang mampu yang menggunakan fasilitas rawat inap Kelas III.
   f. Memberikan layanan Ambulance dan Mobil Jenazah Gratis serta menggratiskan Layanan Bersalin untuk Warga Kurang Mampu.
4. **Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
   a. Menetapkan *One Village One Program* (Satu Kelurahan, Satu Program Unggulan), yang didahului dengan penguatan kapasitas Aparatur, pemantapan Visi Misi Kelurahan dan identifikasi potensi unggulan setiap Kelurahan.

b. Membangun Rumah layak Huni Keluarga Kurang Mampu melalui dana stimulus Pemerintah Daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari).
c. Membangun infrastruktur lingkungan melalui dana stimulus pemerintah daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari).
d. Santunan Kematian Warga Kurang Mampu.
e. Bantuan Dana Rutin untuk Masjid/Gereja dan tempat ibadah lainnya.
f. Dana Pembinaan Generasi Muda untuk kegiatan usaha produktif dan atau pengembangan prestasi, minat dan bakat.
g. Menggalang kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap *One Village One Program*.

5. **Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukun Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
   a. Penataan kawasan Pasar Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II, sebagai sentra perekonomian modern dengan aksentuasi ornamen kebudayaan lokal.
   b. Mengoptimalkan Pasar Bastiong, Pasar Dufa-Dufa, Pasar Kotabaru dan Pasar Sasa sebagai Pasar Tradisional dengan dukungan regulasi pemerintah.
   c. Penataan taman kota dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib.
   d. Pemantapan Visi dan penataan kawasan Kota Baru berbasis pendidikan dan berciri lokal secara terpadu dan akomodatif terhadap masyarakat setempat.
   e. Penataan area depan kedaton kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai ruang terbuka hijau berciri budaya, yang dijadikan alun-alun kota dan taman ekspresi seni budaya.
   f. Mendorong program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai kota pesisir yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.
   g. Mewujudkan Ternate Bebas Sampah dan Bebas Banjir, yang diutamakan pada kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang menimbulkan kesan kumuh.
6. **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawah, serta Birokrasi yang**

Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif, dan Responsif, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.
b. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.
c. Mengubah *mainset* aparatur yang berorientasi program dengan target serta manfaat terukur, aparatur yang berkarakter demokratis dan terbuka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
d. Menyelenggarakan prinsip *reward and punishman* untuk menilai kinerja dan prestasi aparatur dalam rotasi maupun promosi jabatan.
e. Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur yang diorientasikan pada peningkatan skill dan ketrampilan yang benar-benar dibutuhkan.
f. Penyerahan urusan (kewenangan) dari Pemerintah Kota kepada Kecamatan dan Kelurahan di bidang pelayanan umum.

7. **Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

   a. Memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu.
   b. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi investor.
   c. Pengembangan Koperasi, UMKM, Pedagang Tradisional dan PKL melalui fasilitas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar.
   d. Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan Upah Minimum Kota.
   e. Memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Perempuan dan Kelompok Pemuda.
   f. Menggalakkan kursus dan pelatihan kepada pengangguran terbuka *unskill,* untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal dan pendampingan manajemen.

8. **Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Membentuk lembaga perijinan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Menghilangkan segala bentuk pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik.

c. Menyediakan Database Kependudukan Online.

d. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran Gratis dan dilimpahkan ke Kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

9. **Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara Berkelanjutan,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Melakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat.

b. Bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Petani dan Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya.

c. Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan.

d. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan.

10. **Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi.

b. Mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur'an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sekaligus memberikan pemahaman tentang Syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar.

c. Mengoptimalkan pembinaan Jemaat dan pembinaan Ummat Agama non Muslim sesuai dengan syariat agamanya.

d. Membina Kerukunan antar Ummat Beragama, antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui kegiatan sosial keagamaan dan kebudayaan. Memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Nasional, Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari-hari Besar

Daerah dengan kegiatan bernuasa Keagamaan dan Kebudayaan. Melestarikan Situs, Artifak, Dokumen Sejarah dan Aset Seni Budaya Kota Ternate.

e. Menjamin kesejahteraan Imam Mesjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat.

f. Menjamin pelestarian adat dan budaya Ternate.

11. **Penegakan Supermasi Hukum, Hak Azazi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Kontruktif,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
    a. Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi.
    b. Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
    c. Memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.
    d. Meninjau kembali Peraturan Daerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat.
    e. Memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada warga kurang mampu yang membutuhkannnya.
    f. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hak-hak hukum kepada masyarakat.

F. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Prioritas pembangunan tahun 2015merupakan tahapan untuk memantapkan pembangunan menuju Kota Ternate Bahari Berkesan.

Pembangunan di tahun 2015 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di tahap V:

1. **Sasaran Prioritas Strategis 10: Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat,**

   Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Sosial,dengan program sebagai berikut:

(1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KomunitasAdatTerpencil (KAT) danPenyandangMasalahKesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya.

(2) Program PelayanandanRehabilitasiKesejahteraanSosial.

(3) Program PembinaanAnakTerlantar.

(4) Program Pembinaan Para PenyandangCacatdan Trauma.

(5) Program PembinaanPantiAsuhan/PantiJompo.

(6) Program PembinaanEksPenyandangPenyakitSosial (EksNarapidana, PSK, NarkobadanPenyakitSosialLainnya).

(7) Program PemberdayaanKelembagaanKesejahteraanSosial.

b. Urusan Wajib Kebudayaan,dengan program sebagai berikut:

(1) ProgramPengembanganNilaiBudaya.

(2) Program PengelolaanKekayaanBudaya.

(3) Program PengelolaanmKeragamanBudaya.

(4) Program PengembanganKerjasamaPengelolaanKekayaanBudaya.

c. UrusanWajibPemudadanOlah Raga, dengan program sebagai berikut:

(1) Program PengembangandanKeserasianKebijakanPemuda.

(2) ProgramPeningkatan Peran Serta Kepemudaan.

(3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

(4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

(5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.

(6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga.

(7) Program PeningkatanSaranadanPrasaranaOlah Raga.

d. Urusan PilihanPariwisata,dengan program sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

(2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

(3) ProgramPengembanganKemitraan.

2. Sasaran Prioritas II: Penegakan Supermasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Kontruktif:

Dalamupayamewujudkanprioritasdiatas, maka program pembangunan yang akandilakukanadalahsebagaiberikut:

a. UrusanWajibKesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri dengan program sebagai berikut:

(1) Program PeningkatanKeamanandanKenyamananLingkungan.
(2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.
(3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
(4) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
(5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
(6) Program Pendidikan Politik Masyarakat.
(7) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan memperhatikan keinginan luhur dari para pendiri bangsaserta cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah: **Terwujudnya Ternate menjadi Kota "Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan" (Bahari Berkesan).**

Penjelasan Visi tersebut, yaitu:

1. **Ternate Berbudaya,** bahwa kebijakan pemerintah maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya *adat se atorang*sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral *Moloku Kie Raha* pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan *adat se atorang*dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat.
2. **Ternate Agamais,** adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlaq, berbudipekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram.

3. **Ternate Harmonis,** artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembaruan, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.
4. **Ternate Mandiri,** artinya menjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreativitas dan produktivitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
5. **Ternate Berkeadilan,** artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik di semua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*)**.**
6. **Ternate Berwawasan Lingkungan,** artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan yang seluruh arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang

hijau, asri, nyaman, dan sehat melalui penataan yang terpadu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang diharapkan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan *water front city*, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

b. Misi

Misi pembangunan Kota Ternate dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Ternate yang agamais;
2. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana perekonomian yang lebih representatif;
3. Membangun Ternate sebagai kota pesisir berbasis lingkungan;
4. Membangun Ternate sebagai kota pariwisata berciri budaya dan bahari;
5. Membangun Ternate sebagai kota terbuka, demokratis dan adil;
6. Membangun Ternate yang sehat dan sejahtera.

c. Permasalahan dan Isu-isu Pembangunan

Permasalahan dan isu-isu pembangunan Kota Ternate 2011-2015 adalah:

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a) Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya.

b) Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan

dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat.

c) Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*)sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance.*

d) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainnya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat.

e) Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan.

f) Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.

g) Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh walikota.

2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan

a) Tidak seimbangnya pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar Pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

b) Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*).

c) Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha.

d) Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang investasi yang cukup tinggi.

e) Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan

a) Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat pertambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.

b) Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.

c) Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*)secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.

d) Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.

e) Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara *integratif.*

f) Terabaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.

g) Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan masyarakat pada kawasan sekitar membangun permukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.

h) Kesemrawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkiran menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

4. Masalah Banjir, Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
b) Penataan *drainase* dan pengelolaan persampahan yang belum memadai
c) Minimnya kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.
d) Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5. Masalah Pendidikan dan Kesehatan

a) Kualitas *output* pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia.
b) Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
c) Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua.
d) Komersialisasi kesehatan ini ditandai dengan mahalnya biaya kesehatan akibat pelayanan Rumah Sakit yang belum profesional akibat Praktek Dokter Ahli lebih memilih berpraktek di Rumah Sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSU.
e) Manajemen pelayanan Rumah Sakit yang belum mengakomodasi masyarakat miskin (jamkesda) dan Pemegang Askes.
f) Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD.
g) Kematian ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia.

6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan

a) Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.
b) Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya

angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirnya peran wanita dalam pembangunan, seperti masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate ke depan.

c) Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.
d) Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.
e) Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas *adat se atorang* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.
f) Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan *stakeholder* di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.
g) Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai relegiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.
h) Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal

a) Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate.
b) APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal

(investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksinya gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumber daya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakinmemperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

d. Tujuan

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2011-2015 berdasarkan 11 (sebelas) Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur pada Wilayah Kecamatan, yang diarahkan pada percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan;
2. Mewujudkan pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas, yang diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik;
3. Mewujudkan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas, diarahkan pada upaya meningkatkan sumber daya manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik;

4. Kebijakan anggaran (APBD) yang proporsional dan pro rakyat, diarahkan pada kebijakan anggaran (APBD) yang proporsional dan pro rakyat, yang diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui disain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya;
5. Penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota yang serasi antara kebutuhan dan daya dukung lahan, antara aspek topografi dan kawasan pantai/pesisir berbasis keterpaduan dan keserasian lingkungan sosial budaya dan ekologis, yang diarahkan pada penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman, dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan;
6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif, yang diarahkan pada terwujudnya *good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat;
7. Peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja, yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*);
8. Pelayanan publik yang cepat, murah dan mudah, yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas;
9. Pengembangan masyarakat kawasan pesisir secara berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha

mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing;

10. Membangun kepedulian sosial, kesadaran nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat, yang diarahkan untuk menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya;
11. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

e. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Kota TernateTahun 2011-2015, maka selanjutnya ditetapkan sasaran strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011-2015, yaitu sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	**2**
Tujuan 1: Peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur pada wilayah kecamatan	
Sasaran strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah Kecamatan di luar perkotaan 2) Persentase Kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih 3) Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yangterjangkau layanan listrik PLN

Tujuan 2: Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas	
Sasaran strategis 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyaratakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	1) Indeks Pembangunan Manusia 2) Angka melek huruf seluruh penduduk 3) Nilai UN dan UAS rata-rata - Nilai UN rata-rata SD - Nilai UAS rata-rata SD - Nilai UN rata-rata SLTP - Nilai UAS rata-rata SLTP - Nilai UN rata-rata SLTA - Nilai UAS rata-rata SLTA - Nilai UN rata-rata paket A - Nilai UAS rata-rata paket A - Nilai UN rata-rata paket B - Nilai UAS rata-rata paket B - Nilai UN rata-rata paket C - Nilai UAS rata-rata paket C 4) Angka kelulusan - SD - SLTP - SLTA 5) Angka putus sekolah - SD - SLTP - SLTA 6) Angka rata-rata lama sekolah - SD - SLTP - SLTA 7) Angka partisipasi murni - SD - SLTP - SLTA

	8) Angka partisipasi kasar - SD - SLTP - SLTA 9) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA 10) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 13) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA
Tujuan 3: MewujudkanKesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas	
Sasaran strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit - TBC - DBD - HIV 3) Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk) - Karena penyakit Malaria - Karena penyakit TBC - Karena penyakit DBD - Karena penyakit HIV

	4) Angka kesembuhan penderita TB paru BTA 5) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 6) Angka kematian balita 7) Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 8) Persentase balita gizi buruk 9) Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk 10) Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk 11) Rasio bidan per 100.000 penduduk 12) Rasio perawat per 100.000 penduduk 13) Rasio Posyandu terhadap balita 14) Rasio Puskesmas per satuan penduduk 15) Rasio Pustu per satuan penduduk 16) Persentase kecamatan bebas rawan gizi 17) Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam 18) Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan 19) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan 20) Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk *- Annual Malaria Incidence (AMI)* *- Annual Parasite Incidence (API)*
Tujuan 4: Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat	
Sasaran strategis 4:	1) Rasio belanja langsung terhadap

Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	total belanja 2) Rasio belanja modal terhadap total belanja 3) Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan 4) Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP 5) Persentase peningkatan dana pembangunan Kelurahan 6) Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan - MCK Komunal - Drainase /gorong-gorong - Jalan lingkungan 7) Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda 8) Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikasi tanah
Tujuan 5: Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis	
Sasaran strategis 5: Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	1) Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata 2) Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan 3) Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan 4) Jumlah tempat pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi
Tujuan 6: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan	

Responsif.	
Sasaran strategis 6: Terwujudnya*good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	1) Persentase PNS yang memperoleh penghargaan 2) Persentase PNS yang diberikan sanksi berat 3) Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu 4) Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK
Tujuan 7: Peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja	
Sasaran strategis 7: Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional	1) Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha 2) Nilai modal kerja dan investasi UKM 3) Nilai omzet UKM 4) Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan 5) Tingkat pengangguran terbuka 6) Pendapatan perkapita 7) Laju pertumbuhan ekonomi 8) Tingkat Inflasi
Tujuan 8: Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah	
Sasaran strategis 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	1) Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP 2) Jumlah layanan perizinan bebas biaya 3) Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai 4) Rasio penduduk ber-KTP

	5) Rasio penduduk ber-KK 6) Rasio bayi ber-akte kelahiran 7) Persentase ketersediaan armada sampah
Tujuan 9: Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah	
Sasaran strategis 9: Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	1) Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan 2) Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan 3) Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan
Tujuan 10: Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat	
Sasaran strategis 10: Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	1) Persentase siswa SD kelas VI beragama islam dapat baca tulis Al-Quran 2) Jumlah Taman Pengajian Al-Quran 3) Jumlah pertemuan forum antar umat beragama 4) Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan 5) Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate 6) Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate 7) Persentase situs budaya yang dilestarikan
Tujuan 11: Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif	
Sasaran strategis 11:	1) Jumlah Peraturan Daerah yang

Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	diterbitkan 2) Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan 3) Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani

f. Sasaran Prioritas Program Pembangunan Tahun 2015

Prioritas pembangunan tahun 2015 sesuai RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015, adalah untuk mewujudkan sasaran 10 dan 11, yaitu:

Sasaran10: Membangun kepedulian sosial, kesadaran nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat, yang diarahkan pada:meningkatkanpembinaankerukunanAntarUmmatBeragama, AntarSuku, EtnisdanSubetnis, melaluipenguatanKurikulumPendidikan Agama dankurikulumMuatanLokaltentangBudayadanAdatIstiadat Ternate.

Sasaran 11: Penegakan supermasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan kontruktif, diarahkan pada:memperkuatregulasiterhadappartisipasipublikyang dinamis, efektifdanbertanggungjawabdalammewujudkantransparansidanakuntabilitasdenganmengutamakanStandarPelayanan Minimalpadabidangpelayanandasaruntukpublik.

g. Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

Indikator kinerja utama (IKU) pembangunan Pemerintah Kota Ternate tahun 2015 adalah indikator kinerja sasaran yang ada dalam RPJMD Pemerintah Kota Ternate tahun 2011-2015, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015tersebut adalah sebagai berikut:

	IndikatorKinerjaUtama	Target	Satuan
1	Persentasepanjangjalandalamkondisibaik di wilayahkecamatan di luarperkotaan	60.96	%
2	Persentasekelurahanpadakawasandatarantinggi yang terlayani air bersih	90.00	%
3	Indeks Pembangunan Manusia	78.44	%
4	Nilai UN dan UAS rata-rata		
	- Nilai UN rata-rata SD	5.50	
	- Nilai UAS rata-rata SD	7.50	
	- Nilai UN rata-rata SLTP	5.50	
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00	
	- Nilai UN rata-rata SLTA	5.50	
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00	
	- Nilai UN rata-rata paket A	5.00	
	- Nilai UAS rata-rata paket A	7.00	
	- Nilai UN rata-rata paket B	5.00	
	- Nilai UAS rata-rata paket B	6.50	
	- Nilai UN rata-rata paket C	5.00	
	- Nilai UAS rata-rata paket C	7.00	
5	Angkaputussekolah		
	- SD	0.06	
	- SLTP	0.07	
	- SLTA	0.09	
6	Angkapartisipasimurni		
	- SD	97.31	%
	- SLTP	86.91	%
	- SLTA	82.62	%
7	Angkapartisipasikasar		
	- SD	105.79	%
	- SLTP	99.74	%
	- SLTA	94.73	%
8	RasiojumlahRKB terhadapmuridpadatingkat SD	1 : 32	
9	Rasiojumlah RKB terhadapmuridpadatingkat SLTP	1 : 32	
10	Rasiojumlah RKB terhadapmuridpadatingkat SLTA	1 : 32	
11	Rasio guru terhadapmuridpadatingkat SD	1 : 20	

12	Rasio guru terhadapmuridpadatingkat SLTP	1 : 20	
13	Rasio guru terhadapmuridpadatingkat SLTA	1 : 20	
14	Angkausiaharapanhidup	71	Tahun
15	Angkaprevalensipenyakit		
	- TBC	221/100.000	Pddk
	- DBD	3	‰
	- HIV	0,01/1.000	Pddk
16	Angkakematiankasar		
	- Karenapenyakit Malaria	< 2 per 100.000	Pddk
	- Karenapenyakit TBC	< 2 per 100.000	Pddk
	- Karenapenyakit DBD	< 2 per 100.000	Pddk
	- Karenapenyakit HIV	<5 per 100.000	Pddk
17	Angkakesembuhanpenderita TB paru BTA	65.00	%
18	Angkakematianbayi per 1000 kelahiranhidup	7/1.000	KH
19	Angkakematianbalita	2/1.000	KH
20	Angkakematianibumelahirkan per 100.000 kelahiranhidup	90/100.000	KH
21	Persentasebalitagiziburuk	2	%
22	Rasiopederita malaria terhadapjumlahpenduduk		
	- *Annual Malaria Incidence* (AMI)	19.00	‰
	- *Annual Parasite Incidence* (API)	< 1	‰
23	Persentasepeningkataninfrastrukturlingkungan		
	- MCK Komunal	18.63	%
	- Drainase /gorong-gorong	14.79	%
	- Jalanlingkungan	43.63	%
24	Rasioruangterbukahijau (RTH) di kawasanperkotaan	20.00	%
25	Rata-rata penyelesaianrekomendasihasilpemeriksaan APIP dan BPK	40.00	%
26	Tingkat pengangguranterbuka	8.72	%
27	Pendapatanperkapita	30,007,344,00	Rp
28	Lajupertumbuhanekonomi	7.60	%
29	Tingkat Inflasi	9.34	%
30	Rasiopendudukber-KTP	1 : 0,62	
31	Rasiopendudukber-KK	1 : 0,62	
32	Rasiobayiber-aktekelahiran	1 : 0,60	
33	Jumlahkelompokmasyarakatkawasanpesisir yang telahmengolahhasilperikanan	100	Klp.
34	Persentasesiswa SD kelas VI beragama Islam dapatbacatulis Al-Quran	100.00	%

35	PersentasejumlahkasuspelanggaranPerda yang dapatditangani	100,00	%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN2015

Sesuai dengan RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015, maka tahap pembangunan tahun 2015 merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian tahun sebelumnya.Pembangunan Kota Ternate tahun 2015lebih ditegaskan pada komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di tahap V,yaitu:

1. **Membangun kepedulian sosial, kesadaran nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat,**
2. **Penegakan supermasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan kontruktif,**

Namun demikian, 11 prioritas pembangunan Kota Ternate sesuai RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015 tetap dilaksanakan secara simultan dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang dianggap urgen untuk dilaksanakan dan ditetapkan pada Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015. Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2015adalah sebagai berkut:

SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
Sasaran strategis 1: Terwujudnyapemerataaninfrastruktur di wilayahkecamatan di luarkawasanperkotaansecara berkeadilan	1 Persentasepanjangjalandalamkondisibaik di wilayahkecamatan di luarperkotaan 2 Persentasekelurahanpadakawasandatarantinggi yang terlayani air bersih 3 Persentasekelurahan di wilayahkecamatan di luarperkotaan yang terjangkaulayananlistrik PLN	60.96 % 90.00 % 66.67 %
Sasaran strategis 2: Meningkatnyaderajatpendidikanmasyaratakatdenganperluasanaksespendidikan yang murahdanterjangkausaranadanfasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukupdanmutu yang	1 Indeks Pembangunan Manusia 2 Angkamelekhurufseluruhpenduduk 3 Nilai UN dan UAS rata-rata - Nilai UN rata-rata SD - Nilai UAS rata-rata SD - Nilai UN rata-rata SLTP	78.44 % 100.00 % 5.50 7.50 5.50

terusmembaik		- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00	
		- Nilai UN rata-rata SLTA	5.50	
		- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00	
		- Nilai UN rata-rata paket A	5.00	
		- Nilai UAS rata-rata paket A	7.00	
		- Nilai UN rata-rata paket B	5.00	
		- Nilai UAS rata-rata paket B	6.50	
		- Nilai UN rata-rata paket C	5.00	
		- Nilai UAS rata-rata paket C	7.00	
	4	Angkakelulusan		
		- SD	100.00	%
		- SLTP	100.00	%
		- SLTA	100.00	%
	5	Angkaputussekolah		
		- SD	0.06	
		- SLTP	0.07	
		- SLTA	0.09	
	6	Angka rata-rata lama sekolah		
		- SD	6	Tahun
		- SLTP	3	Tahun
		- SLTA	3	Tahun
	7	Angkapartisipasimurni		
		- SD	97.31	%
		- SLTP	86.91	%
		- SLTA	82.62	%
	8	Angkapartisipasikasar		
		- SD	105.79	%
		- SLTP	99.74	%
		- SLTA	94.73	%
	9	Rasioketersediaansekolahterhadappendudukusiasekolah		
		- SD	1 : 203	%
		- SLTP	1 : 133	%
		- SLTA	1 : 286	%
	10	Rasiojumlah RKB terhadapmuridpadatingkat SD	1 : 32	
	11	Rasiojumlah RKB terhadapmuridpadatingkat SLTP	1 : 32	
	12	Rasiojumlah RKB terhadapmuridpadatingkat SLTA	1 : 32	
	13	Rasio guru	1 : 20	

		terhadapmuridpadatingkat SD		
	14	Rasio guru terhadapmuridpadatingkat SLTP	1 : 20	
	15	Rasio guru terhadapmuridpadatingkat SLTA	1 : 20	
Sasaran strategis 3:	1	Angkausiaharapanhidup	71	Tahun
Meningkatnyaderajatkesehatanmasyarakat	2	Angkaprevalensipenyakit		
		- TBC	221/100.000	Pddk
		- DBD	3	‰
		- HIV	0,01/1.000	Pddk
	3	Angkakematiankasar (per 1.000 penduduk)		
		- Karenapenyakit Malaria	< 2 per100.000	Pddk
		- Karenapenyakit TBC	< 2 per 100.000	Pddk
		- Karenapenyakit DBD	< 2 per 100.000	Pddk
		- Karenapenyakit HIV	<5 per 100.000	Pddk
	4	Angkakesembuhanpenderita TB paru BTA	65.00	%
	5	Angkakematianbayi per 1000 kelahiranhidup	7/1.000	KH
	6	Angkakematianbalita	2/1.000	KH
	7	Angkakematianibumelahirkan per 100.000 kelahiranhidup	90/100.000	KH
	8	Persentasebalitagiziburuk	2,00	%
	9	Rasiodokterspesialis per 100.000 penduduk	17 : 100.000	Pddk
	10	Rasiodoktergigi per 100.000 penduduk	10 : 100.000	Pddk
	11	Rasiobidan per 100.000 penduduk	130 : 100.000	Pddk
	12	Rasioperawat per 100.000 penduduk	235 : 100.000	Pddk
	13	RasioPosyanduterhadapbalita	1 : 75	Balta
	14	RasioPuskesmas per satuanpenduduk	1 : 30.000	Pddk
	15	RasioPustu per satuanpenduduk	1 : 15.000	Pddk
	16	Persentasekecamatanbebasrawangizi	100.00	%
	17	Persentasekelurahanterkena KLB yang ditangani< 24 jam	100.00	%
	18	Persentasekeluargamiskin yang mendapatpelayanankesehat	100.00	%

		an		
	19	Persentasepersalinanolehtenagakesehatan	91.00	%
	20	Rasiopederita malaria terhadapjumlahpenduduk		
		- *Annual Malaria Incidence* (AMI)	19	‰
		- *Annual Parasite Incidence* (API)	< 1	‰
Sasaran strategis 4: TerwujudnyakebijakanAnggaran (APBD) yang proporsionaldan Pro Rakyat	1	Rasiobelanjalangsungterhadap total belanja	46.19	%
	2	Rasiobelanja modal terhadap total belanja	19,84	%
	3	Persentaserealisasidanpartisipatifkecamatan	100.00	%
	4	Persentaserealisasidana cost sharing PNPM MP	100.00	%
	5	Persentasepeningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	25.34	%
	6	Persentasepeningkataninfrastrukturlingkungan		
		- MCK Komunal	18.63	%
		- Drainase /gorong-gorong	14.79	%
		- Jalanlingkungan	43.63	%
	7	Persentasepemberianbantuanpembinaanbagigenerasimuda	100.00	%
	8	Jumlahmasyarakatmiskin yang mendapatbantuansertifikattanah	30	KK
Sasaran strategis 5: Tertatanyainfrastrukturperkotaansebagaikotajasadanperdagangandenganpemanfaatanruangkotasecaraterpadu	1	Jumlahlokasi di kawasanpasargamalamadantapak yang ditata	12	Lokasi
	2	Persentasetamankota di kawasanperkotaan yang difungsikan	70.00	%
	3	Rasioruangterbukahijau (RTH) di kawasanperkotaan	20.00	%
	4	Jumlahtempatpedagang kaki lima di pusatkota yang direlokasi	2	Lokasi
Sasaran strategis 6: Terwujudnya*good government*, dengansumberdayaaparatur yang profesional,	1	Persentase PNS yang memperolehpenghargaan	7.66	%
	2	Persentase PNS yang diberikansanksiberat	0.08	%
	3	Persentasekenaikanpangkat PNS tepatwaktu	100.00	%

kreatif,inovatif, yang mampumenjaminpeningkatan kualitaspelayanan, akuntabilitasdankemandirian masyarakat	4	Rata-rata penyelesaianrekomendasiha silpemeriksaan APIP dan BPK	40.00	%
Sasaran strategis 7: Meningkatnyakesejahteraanp etani, nelayan, pekebun, peternak, buruhdanpekerja, koperasi, usahamikrokecilmenengah (UMKM), pedagang kaki lima danpedagangtradisional.	1	Jumlahkelompokperempuan danpemuda yang diberikan modal usaha	3	Klp.
	2	Nilai modal kerjadaninvestasi UKM	899.251.416.220.00	Rp
	3	Nilaiomzet UKM	2.327.137.548.272.00	Rp
	4	Jumlahkelompoktani yang memperolehbantuan	38	Klp.
	5	Tingkat pengangguranterbuka	8.72	%
	6	Pendapatanperkapita	30.007.344,00	Rp
	7	Lajupertumbuhanekonomi	7,60	%
	8	Tingkat Inflasi	9.34	%
Sasaran strategis 8: Terwujudnyapelayananpublik yang cepat, mudah, murah, nyamandanberkualitas	1	Jumlah SKPD pelayananpublik yang telahmemiliki SOP	6	SKPD
	2	Jumlahlayananperizinanbeba sbiaya	14	Jenis
	3	Jumlahtempatpelayananpubli k yang telahdifasilitasidengansarana memadai	11	Tempat
	4	Rasiopendudukber-KTP	1 : 0,62	
	5	Rasiopendudukber-KK	1 : 0,62	
	6	Rasiobayiber-aktekelahiran	1 : 0,60	
	7	Persentaseketersediaan armada sampah	77.08	%
Sasaran strategis 9: Meningkatnyakemandirianma syarakatpesisir	1	Jumlahkelompoknelayantang kap yang memperolehbantuan	82	Klp.
	2	Jumlahkelompoknelayanbudi daya yang memperolehbantuan	2	Klp.
	3	Jumlahkelompokmasyarakat kawasanpesisir yang telahmengolahhasilperikanan	100	Klp.
Sasaran strategis 10: Tertanganinyapermasalahan menurunnyakesadaranspiritu alitaskeberagamaan, permasalahansosial, danbudaya	1	Persentasesiswa SD kelas VI beragama Islam dapatbacatulis Al-Quran	100.00	%
	2	Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina	135	TPQ
	3	Jumlahpertemuan forum antarumatberagama	2	Kali

	4	Persentasejumlah PSK yang terjaringdandiberikanpembinaan	100.00	%
	5	Persentasesekolahdasar yang telahmengajarkanbahasadaerah Ternate	100.00	%
	6	Persentasemeningkatnyajumlahpesertapagelaransenibudaya Ternate	10.00	%
	7	Persentasesitusbudaya yang dilestarikan	40.74	%
Sasaran strategis 11: Tertanganinyamasalahpenegakandankepastianhukum di daerah	1	JumlahPeraturan Daerah yang diterbitkan	8	Perda
	2	Persentasepermasalahanhukumpemerintah Kota Ternate yang dapatdiselesaikan	100.00	%
	3	PersentaseJumlahkasuspelanggaranPerda yang dapatditangani	100.00	%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

a. Penetapan Kategori Nilai Capaian

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Dalam menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2015 digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	85 sampai dengan 100	Sangat Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Ternate kedepan.

b. Pengukuran Kinerja

1) Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 menggambarkan tingkat kinerja pencapaian sasaran strategis pada Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2015. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 pada formulir pengukuran kinerja terlampir, nilai capaian masing-masing indikator kinerja utama berkisar antara 37,26% sampai dengan 221,05%. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama		Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	60.96	%	61.37	100.68
2	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	90,00	%	90.00	100.00
3	Indeks Pembangunan Manusia	78.44	%	80.25	102.31
4	Nilai UN dan UAS rata-rata				
	- Nilai UN rata-rata SD	5.50	%	6.00	109.09
	- Nilai UAS rata-rata SD	7.50	%	7.50	100.00
	- Nilai UN rata-rata SLTP	5.50	%	6.00	109.09
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00	%	8.00	100.00
	- Nilai UN rata-rata SLTA	5.50	%	6.00	109.09
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00	%	8.00	100.00
	- Nilai UN rata-rata paket A	5.00	%	5.00	100.00
	- Nilai UAS rata-rata paket A	7.00	%	7.00	100.00
	- Nilai UN rata-rata paket B	5.00	%	5.00	100.00
	- Nilai UAS rata-rata paket B	6.50	%	6.50	100.00
	- Nilai UN rata-rata paket C	5.00	%	5.00	100.00
	- Nilai UAS rata-rata paket C	7.00	%	7.00	100.00
5	Angka putus sekolah				
	- SD	0.06	%	0.07	116.67
	- SLTP	0.07	%	0.08	114.29
	- SLTA	0.09	%	0.09	100.00
6	Angka partisipasi murni				
	- SD	97.31	%	89.07	91.53
	- SLTP	86.91	%	72.39	83.29
	- SLTA	82.62	%	70.02	84.75
7	Angka partisipasi kasar				
	- SD	105.79	%	98.11	92.74
	- SLTP	99.74	%	72.39	72.58
	- SLTA	94.73	%	70.02	73.92
8	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1 : 32		1 : 27	94.57
9	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 32		1 : 27	94.57
10	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 32		1 : 30	97.83
11	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1 : 20		1 : 15	93.75
12	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 20		1 : 12	90.00

13	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 20		1 : 13	91.25
14	Angka usia harapan hidup	71	Tahun	70	98.59
15	Angka prevalensi penyakit				
	- TBC	221/100.000	Pddk	225/100.000	98,22
	- DBD	< 3	‰	2.30	130,43
	- HIV	0,01/1.000	Pddk	0,01/1.000	100.00
16	Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk)				
	- Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000	Pddk	5 per 100.000	38.00
	- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000	Pddk	4,7 per 100.000	40.43
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000	Pddk	2,2 per 100.000	86.36
	- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000	Pddk	3,4 per 100.000	144.12
17	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA	65.00	%	55.00	84.62
18	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000	KH	6.71/1.000	97.17
19	Angka kematian balita	2/1.000	KH	0,95/1.000	221,05
20	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	90/100.000	KH	143,9/100.000	62.54
21	Persentase balita gizi buruk	2,00	%	0.8	160.00
22	Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk				
	- *Annual Malaria Incidence* (AMI)	19.00	‰	29.00	65.52
	- *Annual Parasite Incidence* (API)	< 1	‰	10.00	9.00
23	Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan				
	- MCK Komunal	18.63	%	18.63	100.00
	- Drainase /gorong-gorong	14.79	%	16.91	114.33
	- Jalan lingkungan	43.63	%	43.90	100.61
24	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	20.00	%	19.25	96.25
25	Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	40.00	%	41.415	103.54
26	Tingkat pengangguran terbuka	8.72	%	6.87	121.22
27	Pendapatan perkapita	30.007.344,00	Rp	33.534.337,00	111.75
28	Laju pertumbuhan ekonomi	7.60	%	8.08	106.32
29	Tingkat Inflasi	9.34	%	4.51	151.71
30	Rasio penduduk ber-KTP	1 : 0,62		1 : 0,69	100.12
31	Rasio penduduk ber-KK	1 : 0,62		1 : 0,91	100.48

32	Rasio bayi ber-akte kelahiran	1 : 0,60		1 : 0,39	99.65
33	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	100	Klp.	101	101.00
34	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran	100.00	%	100.00	100.00
35	Persentase jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	100.00	Kasus	100.00	100.00

Pada tabel tersebut diatas menunjukan bahwa dari 35 (tiga puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), 31 (tiga satu) mencapai hasil optimal ≥85,00% dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran nilai capainnya rendah,

Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, diuraikan pada Analisa Capaian Kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menunjukan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Ternate tahun 2015.

2) Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tahun 2015 dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran (Formulir Pengukuran Kinerja terlampir) nilai capaian masing-masing indikator kinerja sasaran berkisar antara 37,26% sampai dengan 221,05% yang dapat dikelompokan sebagai berikut:

No	Capaian Kinerja Indikator Sasaran	Predikat	Jumlah
1	85 sampai dengan 100%	Sangat Berhasil	74
2	70 s/d kurang dari 85%	Berhasil	5
3	55 s/d kurang dari 70%	Cukup berhasil	1
4	Kurang dari 55%	Tidak berhasil	1
Jumlah			82

Tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	60.96 %	61.37 %	100.68
	2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	90.00 %	90.00 %	100.00
	3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	66.67 %	66.67 %	100.00
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyaratakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	1 Indeks Pembangunan Manusia	78.44 %	80.25 %	102.31
	2 Angka melek huruf seluruh penduduk	100.00 %	100.00 %	100.00
	3 Nilai UN dan UAS rata-rata			
	Nilai UN rata-rata SD	5.50	6.00	109.09
	Nilai UAS rata-rata SD	7.50	7.50	100.00
	Nilai UN rata-rata SLTP	5.50	6.00	109.09
	Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00	8.00	100.00
	Nilai UN rata-rata SLTA	5.50	6.00	109.09
	Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00	8.00	100.00
	Nilai UN rata-rata paket A	5.00	5.00	100.00
	Nilai UAS rata-rata paket A	7.00	7.00	100.00
	Nilai UN rata-rata paket B	5.00	5.00	100.00
	Nilai UAS rata-rata paket B	6.50	6.50	100.00
	Nilai UN rata-rata paket C	5.00	5.00	100.00
	Nilai UAS rata-rata paket C	7.00	7.00	100.00
	4 Angka kelulusan			
	SD	100.00 %	100.00 %	100.00
	SLTP	100.00 %	100.00 %	100.00
	SLTA	100.00 %	100.00 %	100.00
	5 Angka putus sekolah			
	SD	0.06	0.07	116.67
	SLTP	0.07	0.08	114.29
	SLTA	0.09	0.09	100.00
	6 Angka ratarata lama sekolah			

		SD	6 Thn	6 Thn	100.00
		SLTP	3 Thn	3 Thn	100.00
		SLTA	3 Thn	3 Thn	100.00
	7	Angka partisipasi murni			
		SD	97.31 %	89.07 %	91.53
		SLTP	86.91 %	72.39 %	83.29
		SLTA	82.62 %	70.02 %	84.75
	8	Angka partisipasi kasar			
		SD	105.79 %	98.11 %	92.74
		SLTP	99.74 %	72.39 %	72.58
		SLTA	94.73 %	70.02 %	73.92
	9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah			
		SD	1 : 203%	1 : 164%	85.17
		SLTP	1 : 133%	1 : 177%	122.80
		SLTA	1 : 286%	1 : 273%	96.24
	10	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1 : 32	1 : 27	94.57
	11	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 32	1 : 27	94.57
	12	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 32	1 : 30	97.83
	13	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1 : 20	1 : 15	93.75
	14	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 20	1 : 12	90.00
	15	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 20	1 : 13	91.25
Sasaran Strategis 3:	1	Angka usia harapan hidup	71 Thn	70 Thn	98.59
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Angka prevalensi penyakit			
		TBC	221/100.000 Pddk	225/100.000 Pddk	101.78
		DBD	3 ‰	2.3 ‰	130,43
		HIV	0,01/1.000 Pddk	0,01/1.000 Pddk	100.00

	3	Angka kematian kasar (per 1.000 pddk)			
		Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000 Pddk	5 per 100.000 Pddk	38.00
		Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000 Pddk	4.7 per 100.000 Pddk	40.43
		Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk	2.2 per 100.000 Pddk	86.36
		Karena penyakit HIV	<5 per 100.000 Pddk	3.4 per 100.000 Pddk	144.12
	4	Angka kesembuhan penderita TB paru BTA	65.00 %	55.00 %	84.62
	5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000 KH	6.71/1.000 KH	97.17
	6	Angka kematian balita	2/1.000 KH	0.95/1.000 KH	221,05
	7	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	90/100.000 KH	143.9/ 100.000 KH	62.54
	8	Persentase balita gizi buruk	2.00 %	0.8 %	160.00
	9	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	17 : 100.000 Pddk	16 : 100.000 Pddk	94.12
	10	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	10 : 100.000 Pddk	9 : 100. Pddk	90.00
	11	Rasio bidan per 100.000 penduduk	130 : 100.000 Pddk	120 : 100.000 Pddk	92,31
	12	Rasio perawat per 100.000 penduduk	235 : 100.000 Pddk	211 : 100.000 Pddk	89.79
	13	Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 75	1 : 86	87,21
	14	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 30.000 pddk	1 : 20.272 pddk	147.99
	15	Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 pddk	1 : 14.480 pddk	103.59
	16	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100.00 %	71.42 %	71.42
	17	Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam	100.00 %	100.00 %	100.00

	18	Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00 %	100.00 %	100.00
	19	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	91.00 %	89.36 %	98.20
	20	Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk			
		Annual Malaria Incidence (AMI)	19.00 ‰	29.00 ‰	65.52
		Annual Parasite Incidence (API)	< 1 ‰	10.00 ‰	9.00
Sasaran Strategis 4: Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	1	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	46.19 %	45.10 %	97.63
	2	Rasio belanja modal terhadap total belanja	19.84 %	18.14 %	94.57
	3	Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100.00 %	99.99%	99.99
	4	Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP	100.00 %	94.06 %	94.06
	5	Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	25.34 %	25.56 %	100.87
	6	Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan			
		- MCK Komunal	18.63 %	18.63 %	100.00
		- Drainase /goronggorong	14.79 %	16.91 %	114.33
		- Jalan lingkungan	43.63 %	43.90 %	100.61
	7	Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100.00 %	99.00 %	99.00
	8	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30 KK	30 KK	100.00
Sasaran Strategis 5: Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	1	Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00
	2	Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	70.00 %	77.78 %	111.11

	3	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	20.00 %	19.25 %	96.25
	4	Jumlah tempat pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	100.00
Sasaran Strategis 6: Terwujudnya *good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	1	Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	7.66 %	12.85 %	167.75
	2	Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0.08 %	0.12 %	146.94
	3	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00
	4	Ratarata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	40.00 %	41.415 %	103.54
Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	1	Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	3 Klp.	3 Klp.	100.00
	2	Nilai modal kerja dan investasi UKM	899.251.416.220,00 Rp	925.881.416.220,00 Rp	102.96
	3	Nilai omzet UKM	2.327.137.548.272,00 Rp	2.445.971.048.270,00 Rp	105.11
	4	Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	38 Klp.	38 Klp.	100.00
	5	Tingkat pengangguran terbuka	8.72 %	6.87 %	121.22
	6	Pendapatan perkapita	30.007.344,00 Rp	33.534.337.00 Rp	111.75
	7	Laju pertumbuhan ekonomi	7.60 %	8.08 %	106.32
	8	Tingkat Inflasi	9.34 %	4.51 %	151.71
Sasaran Strategis 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	1	Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	6 SKPD	6 SKPD	100.00
	2	Jumlah layanan perizinan bebas biaya	14 Jenis	16 Jenis	114.29
	3	Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	11 Tempat	11 Tempat	100.00

	4	Rasio penduduk ber KTP	1 : 0,62	1 : 0,69	100.12
	5	Rasio penduduk ber KK	1 : 0,62	1 : 0,91	100.48
	6	Rasio bayi berakte kelahiran	1 : 0,60	1 : 0,39	99.65.
	7	Persentase ketersediaan armada sampah	77.08 %	72.00 %	93.41
Sasaran Strategis 9: Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	1	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	42 Klp.	42 Klp.	100.00
	2	Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan	4 Klp.	4 Klp.	100.00
	3	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	25 Klp.	25 Klp.	100.00
Sasaran Strategis 10: Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	1	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	100.00 %	100.00 %	100.00
	2	Jumlah Taman Pengajian AlQuran yang dibina	135 TPQ	125 TPQ	92.59
	3	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4 Kali	2 Kali	50.00
	4	Ratarata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	100%	100%	100%
	5	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100.00 %	100.00 %	100.00
	6	Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate	10.00 %	11.11 %	111.10
	7	Persentase situs budaya yang dilestarikan	40.74 %	44.44 %	109.09
Sasaran Strategis 11: Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	1	Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	8 Perda	7 Perda	87.50
	2	Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100.00
	3	Persentase kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	100.00%	100.00%	100.00

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Formulir Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2015, diketahui kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2015 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari 11 (sebelas) sasaran tahun 2015, semuanya mencapai hasil optimal ≥ 85%. 11 (sebelas) sasaran tersebut mempunyai indikator sasaran sebanyak 82. Hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran, menunjukan bahwa sebanyak 74 (90,24%) indikator sasaran mencapai nilai optimal ≥85,00% dan hanya 8 (9,76%) indikator kinerja sasaran yang nilai capaiannya kurang optimal <85,00%. Realisasi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan

Pencapaian target sasaran 1 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	60.96 %	61,37 %	100,68 %
2	Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	90.00 %	90,00 %	100,00 %
3	Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik	66,67 %	66,67 %	100,00 %
JUMLAH RATA-RATA				100.22

Pada tabel tersebut di atas menunjukan bahwa tiga Indikator kinerja sasaran, yaitu: persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan, persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih, dan persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik mencapai hasil optimal ≥85,00%.

Realisasi kinerja sasaran 1, yaitu: **Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan mencapai 100,22%.** Capaian kinerja sasaran 1 tersebut, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	101,64 %	91,02 %	100,70 %	92,82 %	100.22 %

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran **terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan,** capaian 5 tahun terakhir fliktuatif. Capaian terendah tahun 2012 dengan nilai capaian 91,02%, tertinggi yaitu pada tahun 2011 dengan nilai capaian 101.64 %. Capaian tahun 2015 tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 92,82%, maka terjadi kenaikan realisasi capaian tahun 2015 sebesar 7.40%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran: Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur di Wilayah Kecamatan di Luar Kawasan Perkotaan Secara Berkeadilan 5 Tahun terakhir

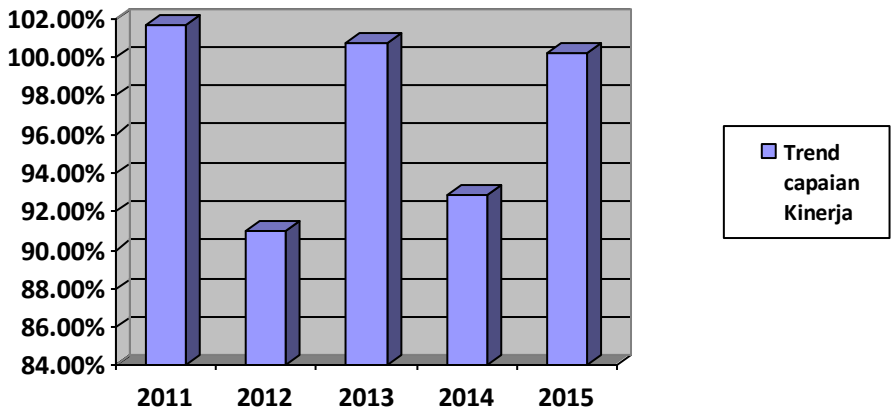

Sasaran 2:

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik

Pencapaian target sasaran 2 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,44 %	80,25 %	102,31
2	Angka melek huruf seluruh penduduk	100,00 %	100,00 %	100,00
3	Nilai UN dan UAS RataRata			
	- Nilai UN Ratarata SD	5,50	6,00	109,09
	- Nilai UAS RataRata SD	7,50	7,50	100,00
	- Nilai UN Ratarata SLTP	5,50	6,00	109,09
	- Nilai UAS RataRata SLTP	8,00	8,00	100,00
	- Nilai UN Ratarata SLTA	5,50	6,00	109,09
	- Nilai UAS RataRata SLTA	8,00	8,00	100,00
	- Nilai UN RataRata Paket A	5,00	5,00	100,00
	- Nilai UAS RataRata Paket A	7,00	7,00	100,00
	- Nilai UN RataRata Paket B	5,00	5,00	100,00
	- Nilai UAS RataRata Paket B	6,50	6,50	100,00
	- Nilai UN RataRata Paket C	5,00	5,00	100,00
	- Nilai UAS RataRata Paket C	7,00	7,00	100,00
4	Angka Kelulusan			
	- SD	100,00 %	100,00 %	100,00
	- SLTP	100,00 %	100,00 %	100,00
	- SLTA	100,00 %	98,00 %	98,00
5	Angka putus sekolah			
	- SD	0,06 %	0,07 %	116,67
	- SLTP	0,07 %	0,08 %	114,29
	- SLTA	0,09 %	0,09 %	100,00
6	Angka ratarata lama sekolah			
	- SD	6 Tahun	6 Thn	100,00
	- SLTP	3 Tahun	3 Thn	100,00
	- SLTA	3 Tahun	3 Thn	100,00
7	Angka partisipasi murni			
	- SD	97,31 %	89,07 %	91,53
	- SLTP	86,91 %	72,39 %	83,29
	- SLTA	82,62 %	70,02 %	84,75
8	Angka partisipasi kasar			
	- SD	105,79 %	98,11 %	92,74
	- SLTP	99,74 %	73,39 %	72,58
	- SLTA	94,73 %	70,02 %	73,92

9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA	 1 : 203 % 1 : 133 % 1 : 286 %	 1 : 164 % 1 : 177 % 1 : 273 %	 85,17 122,80 96,24
10	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1:32	1:27	94,57
11	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1:32	1:27	94,57
12	Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1:32	1:30	97,83
13	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1:20	1:15	93,75
14	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1:20	1:12	90,00
15	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1:20	1:13	91,25
JUMLAH RATA-RATA				95.58

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran, sebanyak 14 (empat belas) indikator sasaran mencapai hasil optimal optimal ≥85,00%, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia, angka melek huruf seluruh penduduk, nilai UN dan UAS ratarata, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka ratarata lama sekolah, angka partisipasi murni, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD, rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP, rasio jumlah RKB terhadap pada tingkat SLTA, rasio guru terhadap murid pada tingkat SD, rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP dan rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA.

Namun, terdapat 1 indikator sasaran yang nilai capaian rendah, yaitu; angka partisipasi kasar nilai capaian rata-rata 79,74%. Sesuai target angka partisipasi kasar pada jenjang SD 97,31 realisasi 89,07 nilai capaian 91,53%. Pada jenjang SLTP target 99,74%, realisasi 72,39, nilai capaian 72,39%. Jenjang SLTA target 82,62%, realisasi 70,02% nilai capaian 73,92%. Rendahnya nilai capaian tersebut di sebabkan :

1. Pada jenjang SD terjadi pengurangan jumlah siswa sekolah dasar tahun 2015, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 21.000 siswa menjadi 20.794 siswa pada tahun 2015 atau berkurang sebanyak 206 siswa. Penduduk usia 7-12 tahun bertambah

pada tahun 2015, tahun 2014 sebanyak 20.840 orang menjadi 21.362 orang ditahun 2015;

2. Pada jenjang SLTP terjadi pengurangan jumlah siswa SLTP tahun 2015, pada tahun 2014 jumlah siswa 8.863 orang menjadi 8.754 orang pada tahun 2015 atau berkurang sebanyak 109 siswa.. Penduduk usia 13-15 tahun bertambah pada tahun 2015, tahun 2014 sebanyak 10.628 orang menjadi 10.895 orang ditahun 2015.

Capaian kinerja sasaran 2, yaitu **Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik,** tahun 2015 yaitu 95,58% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 104,34%, maka tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 8,76%.

Capaian kinerja sasaran 2: **Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik** pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	102,74 %	109,82%	105,39 %	104,34 %	95,58 %

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2012 dengan nilai capaian 109,82 %, capaian terendah tahun 2015 yaitu

95,58%. Capaian tahun 2015 yaitu 95,58%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 104,34%, maka terjadi penurunan capaian tahun 2015 sebesar 8,76%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Dengan Perluasan Akses Pendidikan Yang Murah Dan Terjangkau Sarana Dan Fasilitas Yang Memadai, Tenaga Guru Yang Cukup Dan Mutu Yang Terus Membaik 5 Tahun terakhir

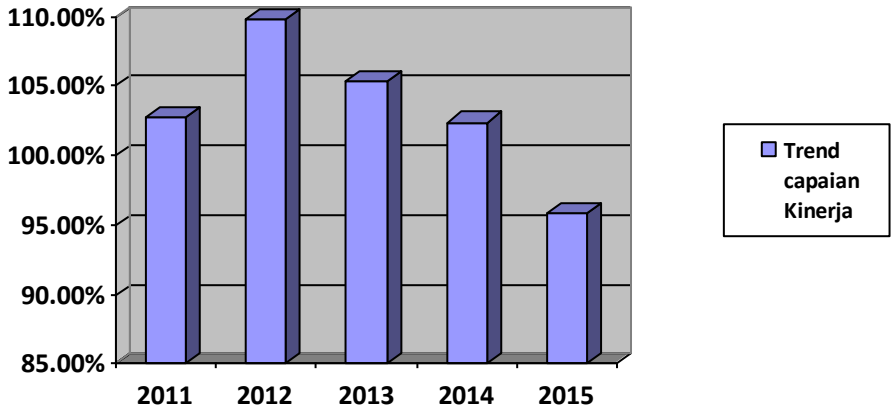

Capain indikator kinerja sasaran 2: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Dengan Perluasan Akses Pendidikan Yang Murah Dan Terjangkau Sarana Dan Fasilitas Yang Memadai, Tenaga Guru Yang Cukup Dan Mutu Yang Terus Membaik, jika dibandingkan dengan standar pelayanan minimal nasional yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD target SPM Nasional 1:32, realisasi di Kota Ternate 1:27. Hal tersebut menunjukan bahwa capaian indikator tersebut di Kota Ternate telah melampaui target SPM Nasional;
2. Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP target SPM Nasional 1:32, realisasi di Kota Ternate 1:27. Hal tersebut menunjukan bahwa capaian indikator tersebut di Kota Ternate telah melampaui target SPM Nasional;
3. Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD target SPM Nasional 1:32, realisasi di Kota Ternate 1:15. Hal tersebut menunjukan bahwa capaian indikator tersebut di Kota Ternate telah melampaui target SPM Nasional .

Sasaran 3:
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pencapaian target sasaran 3 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Angka usia harapan hidup	71 Thn	70 Thn	98,59
2	Angka prevalensi penyakit			
	- TBC	221/100.000 Pddk	225/100.000 Pddk	98,22
	- DBD	3 ‰	2,3 ‰	130,43
	- HIV	0,1/1.000 Pddk	0,01/1.000 Pddk	100,00
3	Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk)			
	- Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000	5 per 100.000	38,00
	- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000	4,7 per 100.000	40,43
	- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000	2,2 per 100.000	86,36
	- Karena penyakit HIV	< 5 per 100.000	3,4 per 100.000	144,12
4	Angka kesembuhan penderita TB paru	65,00 %	55,40 %	84,62
5	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	7/1.000 KH	6,71/1.000 KH	97,17
6	Angka kematian balita	2/1.000 KH	0,95/1.000 KH	221,05
7	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	90/100.000 KH	143,9/100.000 KH	62,54
8	Persentase gizi buruk pada balita	2 %	0,8 %	160,00
9	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	17:100.000 Pddk	16.1:100.000 Pddk	94,12
10	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	10 : 100.000 Pddk	9 : 100.000 Pddk	90,00
11	Rasio bidan per 100.000 penduduk	130 : 100.000 Pddk	120 : 100.000 Pddk	92,31
12	Rasio perawat per 100.000 penduduk	235 : 100.000 Pddk	211: 100.000 Pddk	89,79
13	Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 60	1 : 86	69,77
14	Rasio puskesmas per satuan penduduk	1 : 30.000 Pddk	1 : 20.272 Pddk	147,99
15	Rasio pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 Pddk	1 : 14.480 Pddk	103,59
16	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100,00 %	71,42 %	71,42
17	Persentase kelurahan terkena KLB yang di tangani < 24 jam	100,00 %	100,00 %	100,00

18	Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100,00 %	100,00 %	100,00
19	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	91,00 %	89,36 %	98,20
20	Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk: 1) *Annual Malaria Incidence* (AMI) 2) *Annual parasite incidence* (API)	 19,00 ‰ <1,00 ‰	 29,00 ‰ 10,00 ‰	 65,52, 9,00
JUMLAH RATA-RATA				101,13

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran, sebanyak 16 (enam belas) indikator sasaran mencapai nilai optimal ≥85,00%, yaitu: angka usia harapan hidup, angka prevalensi penyakit Malaria, angka kesembuhan penderita TB Paru, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita, persentase gizi buruk pada balita, rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi per 100.000 penduduk, rasio bidan per 100.000 penduduk, rasio perawat per 100.000 penduduk, rasio Posyandu terhadap balita, rasio Puskesmas per satuan penduduk, rasio Pustu per satuan penduduk, persentase kelurahan terkena KLB yang di tangani < 24 jam, persentase keluarga miskin , yang mendapat pelayanan kesehatan, persentase persalinan oleh tenaga kesehatan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat indikator sasaran yang nila capaiannya sangat tinggi ≥110,00%, yaitu :

1. Angka kematian Balita nilai capaian 221.05%, tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya upaya yang dilakukan antara lain:
   a. Peningkatan penyuluhan kepada keluarga untuk lebih dini membawa anak ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan secara cepat.
   b. Penyediaan sarana pendukung pelayanan balita.
   c. Secara berkesinambungan melakukan penyuluhan tentang PHBS di tingkat keluarga.
   d. Melakukan Deteksi tumbuh kembang pada anak balita setiap 6 bulan di Posyandu dan pemberian Vitamin A pada balita.
   e. Penerapan MBTS secara optimal di Puskesmas.
2. Presentase balita gizi buruk nilai capaian 160%, tingginya nilai capaian tersebut disebabkan:
   a. Tersedianya anggaran yang cukup dalam penanganan kasus gizi buruk;
   b. Pemberian makanan tambahan Balita Gizi kurang secara kontinyu melalui Posyandu;

c. Pelacakan kasus gizi buruk secara kontinyu.

3. Rasio puskesmas per satuan penduduk nilai capaian 147,99%. Tingginya nilai capaian tersebut karena sesuai target 1:30.000 penduduk, namun pada tahun 2015 realisasinya 1:20.272 penduduk hal tersebut karena sampai akhir tahun 2015 Puskesmas di Kota Ternate telah berjumlah 10 Puskesmas.

Dari tabel tersebut diatas juga terlihat bahwa terdapat 6 (enam) indikator sasaran yang nilai capaiannya rendah, yaitu:

1. Angka kematian kasar (per 100.000 penduduk), nilai capaian 77,22%, Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan pentargetan kematian kasar karena malaria tahun 2015 belum didasrkan pada perhitungan penanganan pasien penderita malaria pada rumah sakit suwasta dan dokter praktek di Ternate, pentargetan tersebut didasarkan pada data rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Namun pada perhitungan realisasinya sudah mencakup data pada rumah sakit suwasta dan juga dokter praktek di Ternate. Pada masa yang akan daaing, pentargetan akan memperhitungkan data yang juga dimiliki oleh rumah sakit suwasta dan dokter praktek di Ternate. Rendahnya capaian indikator angka kematian kasar (per 100.00 penduduk), juga dipengaruhi oleh masih rendahnya capaian pada sub indikator karena penyakit TBC. Pada Tahun 2014 penderita TBC sebanyak 519 orang dan meninggal 25 orang, pada tahun 2015 penderita TBC sebanyak 451 orang dan meninggal meningkat yaitu sebanyak 28 orang. Tingginya angka kematian karena malaria disebabkan Pengobatan yang terlambat dilakukan, penyakit penyerta dan pengobatan yang tidak teratur, juga belum optimalnya: promosi aktif lintas program, penjaringan suspek, pemeriksaan kontak BTA positif, pelacakan pasien putus berobat, dan pelacakan pemeriksaan dahak, juga masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit TBC. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan dilakukan promosi aktif lintas program, penjaringan suspek, pemeriksaan kontak BTA positif, pelacakan pasien putus berobat, dan pelacakan pemeriksaan dahak, juga akan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit TBC.

2. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, nilai capaian 62,54%.
   Terget indikator angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup tahun 2015 90/100.000 kelahiran hidup, namun realisasinya 142,9/100.000 kelahiran hidup. Masih rendahnya capaian tersebut disebabkan:
   1) Kondisi ibu hamil yang tidak sehat selama hamil ada penyakit peyerta yang dialami ibu hamil;
   2) Keterbatasan ketersediaan stok darah di layanan rumah sakit rujukan sehingga terlambat dalam penanganan kasus komplikasi padada ibu bersalin;

3) Mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga pelayanan terhadap ibu hamil tidak secara standar;

4) Faktor sosial ekonomi ibu hamil.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan dilakukan:

a. Peningkatan pertolongan persalinan di fasilitasi kesehatan
b. Deteksi dini oleh bidan bersama kader Posyandu dengan melakukan pelacakan kasus ibu hamil dengan faktor resiko maupun tanda bahaya pada ibu hamil dan segera dilakukan penanganan dengan instrument yang dipakai kartu pujirochiati.
c. Penyediaan rumah tunggu kelahiran bagi daerah terpencil yaitu moti, hiri dan batang dua, ibu hamil yang mengalami komplikasi didatangkan lebih awal sebelum jadwal persalinan di rumah tunggu (kurang lebih 1 minggu sebelum persalinan) sehingga kasus komplikasi dapat ditangani oleh dr spesialis
d. Pelayanan Ante natal atau pemeriksaan ibu hamil secara standar pada saat pemeriksaan ibu hamil baik di Puskesmas maupun Polindes

3. Persentase Kecamatan bebas rawan gizi, nilai capaian 71,42%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebab masih ditemukan kecamatan rawan gizi, yaitu pada Kecamatan Batang Dua dan Kecamatan Hiri. Pada kecamatan tersebut masih memilki kasus gizi kurang 15%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan dilakukan

   a. Pemberian makanan bagi balita gizi buruk;
   b. Sosialisasi tentang gizi balita bagi keluarga;
   c. Pelacakan bagi kasus gizi kurang maupun buruk melalui posyandu.

4. Rasio penderita Malaria terhadap jumlah penduduk (*Annual Malaria Incidence* dan *Annual parasite incidence*), nilai capaian 37,26. Rendahnya nilai capaian tersebut karena masih rendahnya nilai capaian *Annual Malaria Incidence* (AMI) dan *Annual parasite incidence (*API). Kondisi tersebut disebabkan mobilitas penduduk yang tinggi, masi banyak Breading Places dan Sistem kewaspadaan dini pemantauan wilayah setempat masi rendah. .

   Untuk mengatasi mpermasalahan tersebut akan dilakukan:

   a. Koordinasi LS terkait dalam pengendalian dan penanggulangan Malaria;
   b. Meningkatkankesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari kontak nyamuk melalui penyuluhan;
   c. Meningkatkan kesadaran penggunaan kelambu; dan

d. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dan pemantauan wilayah setempat

Capaian kinerja sasaran 3: **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	293,07 %	104,14%	190,98 %	93,98 %	101,13%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 3, yaitu **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat** pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2011 dengan nilai capaian 293,07 %, capaian terendah tahun 2014 yaitu 93,98%. Capaian tahun 2015 yaitu 101,13%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 93,98%, maka terjadi kenaikan capaian tahun 2015 sebesar 7.15%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 5 Tahun terakhir

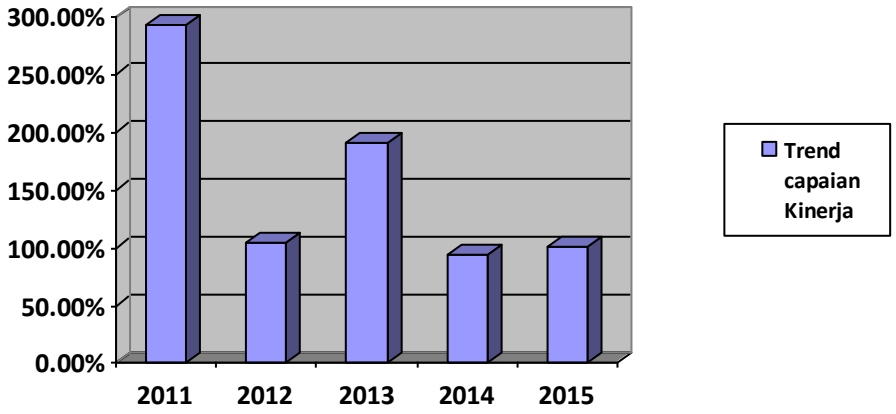

Capain indikator kinerja sasaran 3: **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**, jika dibandingkan dengan standar pelayanan minimal nasional yang diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Kota maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan, target SPM Nasional 100%, realisasi di Kota Ternate 100%, capaian kinerja indikator tersebut telah sesuai dengan target nasional;

2. Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan, target SPM nasional 90%, realisasi di Kota Ternate 89,36%, hal ini menunjukan bahwa realisasi indikator tersebut di Kota Ternate di bawah target SPM Nasional.

Sasaran 4:

Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat

Pencapaian target sasaran 4 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Rasio belanja langsung terhadap total belanja	46,19 %	45,10 %	97,63
2	Rasio belanja modal terhadap total belanja	19,84 %	18,14 %	91,43
3	Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100,00 %	99,99 %	99,99
4	Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP	100,00 %	94,06 %	94,06
5	Persentase Peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	25,34 %	25,56 %	100,87
6	Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan: - MCK Komunal - Drainase /goronggorong - Jalan lingkungan	 18.63 % 14,79 % 43.63 %	 18.630 % 16,91 % 43,90 %	 100.00 114,33 99.00
7	Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100,00 %	99,00 %	99,00
8	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30 KK	30 KK	100,00
JUMLAH RATA-RATA				98.42

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa 8 (delapan) indikator sasaran, semuanya mencapai target optimal ≥85,00%, yaitu: rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, persentase realisasi dana partisipatif kecamatan, persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP, persentase peningkatan dana pembangunan kelurahan, persentase peningkatan infrastruktur lingkungan, persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda, dan jumlah masyarakat

miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah. Dari 8 (delapan) indikator sasaran yang mencapai hasil optimal tersebut,

Capaian kinerja sasaran 4: **Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat**, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	104,62%	100,00%	232,17 %	102,92 %	98.42 %

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 11, yaitu **Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat** pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2013 dengan nilai capaian 232,17 %, capaian terendah tahun 2015 yaitu 98.42%. Capaian tahun 2015 yaitu 98.42%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 102,92%, maka terjadi penurunan capaian tahun 2015 sebesar 4.58%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran: Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat 5 Tahun terakhir

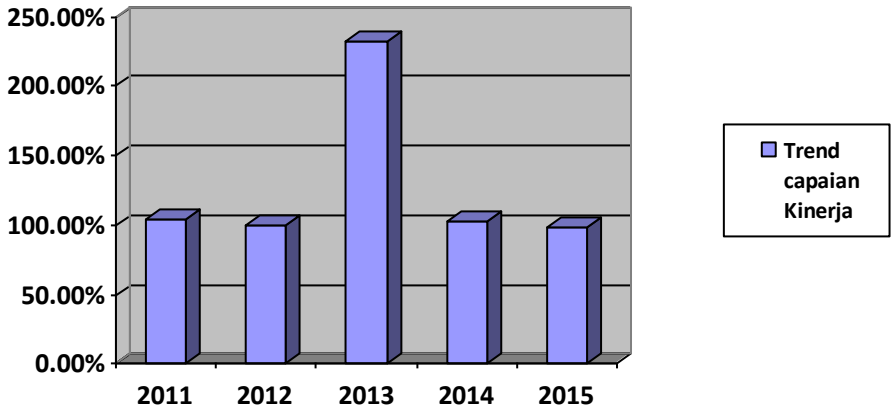

Sasaran 5:

Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu

Pencapaian target sasaran 5 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah lokasi di kawasan pasar Gamalama dan Tapak yang ditata	12 lokasi	12 lokasi	100,00
2	Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	70,00 %	77,78 %	111,11
3	Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	20,00 %	19,25 %	96.25
4	Jumlah pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi	2 Lokasi	2 lokasi	100,00
JUMLAH RATA-RATA				101.84

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai target ≥85,00%, yaitu: Jumlah lokasi di kawasan pasar Gamalama dan Tapak yang ditata, persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan, rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan, dan jumlah pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi.

Capaian kinerja sasaran 5: **Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu**, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	98,47%	99,81%	97,51 %	99,33 %	101.84%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 5, yaitu **Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu** pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2015 dengan nilai capaian 101.84%, capaian terendah tahun 2013 yaitu 97,51%. Capaian tahun 2015 yaitu 101.84%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 99.33%, maka terjadi kenaikan capaian tahun 2015 sebesar 2.51%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran: Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu 5 Tahun terakhir

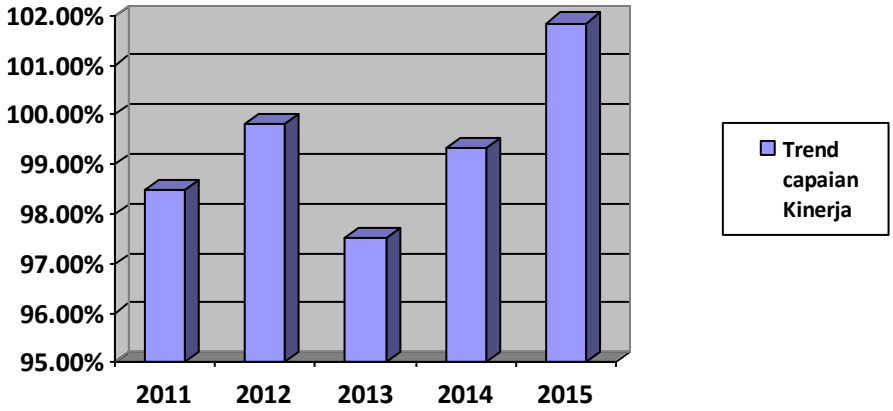

Sasaran 6:

Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

Pencapaian target sasaran 6 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	7,66 %	12.85 %	167,75
2	Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0,08 %	0,12 %	53,06
3	Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100,00 %	100 %	100,00
4	Ratarata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	40,00 %	41,415 %	103,54
JUMLAH RATA-RATA				106.09

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, tiga indikator sasaran mencapai, persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu, dan ratarata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK. Dari indiktor tersebut diatas, indikator PNS yang memperoleh penghargaan nilai

capaian sangat tinggi yaitu 192,50%. Tingginya nilai capaian tersebut karena kenaikan yang sangat signifikan pada PNS yang diberikan penghargaan satya lencana selama tahun 2015, yaitu sebanyak 372 PNS, terdiri dari penghargaan satya lencana 10 tahun sebanyak 200 orang, satya lencana 20 tahun sebanyak 151 orang dan satya lencana 30 tahun sebanyak 21 orang. Namun terdapat indikator sasaran yang nilai capaian rendah, yaitu persentase PNS yang diberikan sanksi berat nilai capaiannya 53%. Hal tersebut terlihat bahwa selama tahun 2015 telah diberikan penjatuhan sanksi berat sebanyak 19 PNS.

Realisasi capaian sasaran 6: **terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat** dengan nilai capaian sebesar 106,09 %, jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2014 sebesar 124,74, maka terjadi penurunan sebesar 18,65%.

Capaian kinerja sasaran 6 : **Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat**, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	97,75%	99,37%	118,01%	124,74%	106,09

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 6, yaitu **terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat** pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2014 dengan nilai capaian 124,74%, capaian terendah tahun 2011 yaitu 97,75%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran 6: Terwujudnya Good Government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu

menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat 5 Tahun terakhir

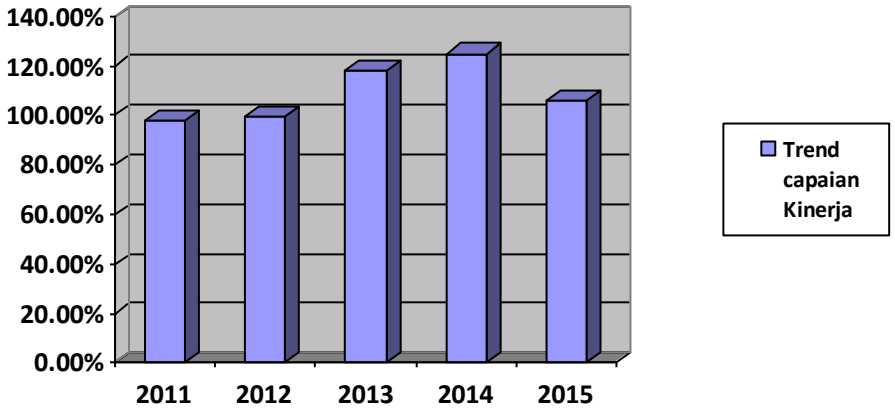

Sasaran 7:

Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional

Pencapaian target sasaran 7 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		%
1	Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	3	Klp.	3	Klp.	100,00
2	Nilai modal kerja dan investasi UKM	899,251,416,220,00	Rp	925,881,416.220,00	Rp	102,96
3	Nilai Omzet UMKM	2,327,137,548,272,00	Rp	2,445,971,048,270,00	Rp	105,11
4	Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	38	Klp.	38	Klp.	100,00
5	Tingkat penganguran terbuka	8,72	%	6,87	%	121,22
6	Pendapatan perkapita	30.007.344,00	Rp	33.534.337,00	Rp	111,75
7	Laju pertumbuhan ekonomi	7,60	%	8,08	%	106,32
8	Tingkat Inflasi	9,34	%	4,51	%	151,71
JUMLAH RATA-RATA						112,38

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran semuanya mencapai hasil optimal di atas ≥85,00%, yaitu: Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha, nilai modal kerja dan investasi UKM, nilai Omzet UMKM, jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan, Tingkat penganguran

terbuka, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Pada indikator tersebut di atas terdapat 2 (dua) indikator yang nilai capainnya sangat tinggi, yaitu:

1. Tingkat pengangguran terbuka, nilai capaian 121,22%, tingginya nilai capaian tersebut disebabkan Selama tahun 2015 terjadi penurunan TPT di Kota Ternate dari 8,72 persen disebabkan oleh dua faktor utama, yang pertama penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 62,14 persen tahun 2014 menjadi 61,17 persen tahun 2015. Penurunan TPAK disebabkan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada penduduk yang sekolah dan mengurus rumah tangga, sehingga persentase angkatan kerja menurun. Faktor kedua, adalah meningkatnya persentase penduduk yang bekerja. Berdasarkan Sakernas 2015, peningkatan terbesar adalah bekerja dengan status pekerja bebas. Bekerja dengan status pekerja bebas ini cenderung bersifat musiman dan tidak tetap (serabutan). Terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dari 85.232 jiwa di tahun 2014 menjadi 88.034 jiwa di tahun 2015. Selain itu, jumlah pengangguran menurun dari 8.147 orang pada tahun 2014 menjadi 6.497 orang pada tahun 2015. Penurunan jumlah pengangguran ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja dimana didominasi oleh pekerja bebas, yakni 3.736 orang di tahun 2014 menjadi 6,87 menjadi 5.967 orang di tahun 2015. Jika dilihat per sektor usaha, secara umum tidak ada perubahan struktur yang signifikan, dimana tenaga kerja terserap pada sektor pertanian, industry pengolahan dan jasa. Sektor yang dominan menyerap tenaga kerja masi tetap sektor jasa, yaitu 77 persen. Sementara itu, sector industry dan pertanian, masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 14,95 persen dan 8,05 persen.

2. Pendapatan perkapita nilai capaian 111,75%, tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat. Berdasarkan angka perkiraan, menunjukkan bahwa pendapatan perkapita ADHB Kota Ternate tahun 2015 sebesar 33,5 juta rupiah per tahun, sedangkan pendapatan perkapita ADHB Kota Ternate 2014 sebesar 30 juta rupiah per tahun. Dengan demikian, pendapatan perkapita ADHB Kota Ternate tahun 2015 lebih besar dibanding pendapatan perkapita ADHB tahun 2014. Pendapatan perkapita ADHB Kota Ternate tahun 2015 dapat dimaknai bahwa rata-rata penduduk Kota Ternate menerima pendapatan sebesar 33,5 juta pada tahun 2015.

3. Tingkat inflasi, nilai capaian 151,71%, tingginya nilai capaian tersebut disebabkan: Laju inflasi *(y-on-y)* pada tahun 2015 turun menjadi 4,47 persen. Perubahan harga

barang dan jasa pada tahun 2015 relatif lebih rendah dibanding tahun 2014, atau penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa pada tahun 2015 lebih rendah dibanding penurunan nilai mata uang tahun 2014. Pada tahun 2015, enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan satu kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar adalah kelompok sandang sebesar 12,03 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,3 persen. Secara kumulatif tahun 2015, kelompok bahan makanan memberikan sumbangan inflasi sebesar 2,4 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,64 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar memberikan sumbangan inflasi sebesar 1,02 persen; kelompok sandang 0,68 persen; kelompok kesehatan 0,05 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,17 persen; kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan menyumbang deflasi sebesar 0,44 persen.

Realisasi capaian kinerja sasaran 7: **Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional** dengan nilai capaian tahun sebesar 112,38%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 107,40%, berarti terjadi kenaikan sebesar 4,98%

Capaian kinerja sasaran 7 : **Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional**, pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional	100,15%	103,41%	99,36%	107,40%	112,38%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 7, yaitu **Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional** pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2015 dengan nilai capaian 112,38%, capaian terendah tahun 2013 yaitu 99,41%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran 7: Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional

5 Tahun terakhir

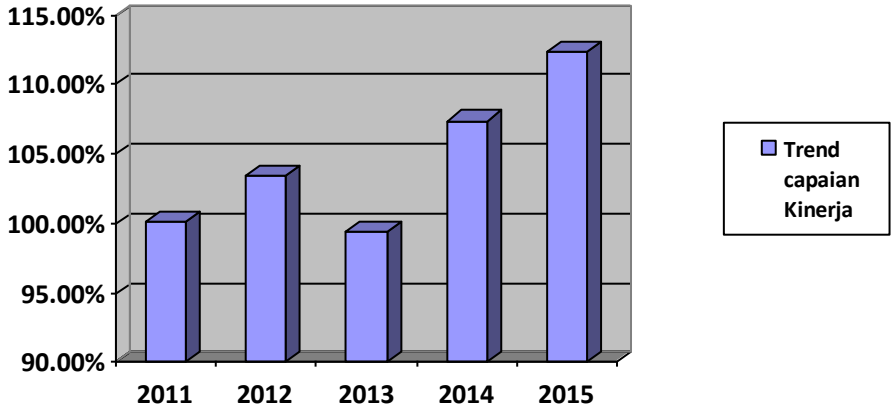

Sasaran 8:

Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas

Pencapaian target sasaran 8 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	6 SKPD	6 SKPD	100.00
2	Jumlah layanan perizinan bebas biaya	14 Jenis	16 Jenis	114,00
3	Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	11 Tempat	11 Tempat	100,00
4	Rasio penduduk ber KTP	1 : 0,62	1 : 0,69	100,12
5	Rasio penduduk ber KK	1 : 0,62	1 : 0,91	100,48
6	Rasio bayi ber akte kelahiran	1 : 0,60	1 : 0,39	99,65
7	Persentase ketersediaan armada sampah	77,08 %	72,00 %	93,41
JUMLAH RATA-RATA				101.09

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa dari 7 (tujuh) indikator sasaran, semuanya mencapai nilai optimal di atas ≥85,00%, yaitu: jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP, jumlah layanan perizinan bebas biaya, jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai, Rasio penduduk berKTP, Rasio penduduk ber KK, Rasio Bayi berakte kelahiran dan persentase ketersediaan armada sampah. Pada indikator jumlah layanan perizinan bebas biaya nilai capaian 114.00% disebabkan adanya capaian realisasi target yang signifikan. Target layanan perizinan bebas biaya tahun 2014, yaitu sebanyak 14 jenis namun realisasinya sebanyak 16 jenis .

Capaian sasaran 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas sebesar 101,09% tersebut, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 95,48%, maka terjadi kenaikan sebesar 5,61%

Capaian realisasi kinerja sasaran 8 tersebut diatas pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	90,79 %	96,35 %	101,25 %	95,48 %	101,09 %

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 8, yaitu **Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas** pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2013 dengan nilai capaian 101,25 %, capaian terendah tahun 2011 yaitu 90,79%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas 5 Tahun terakhir

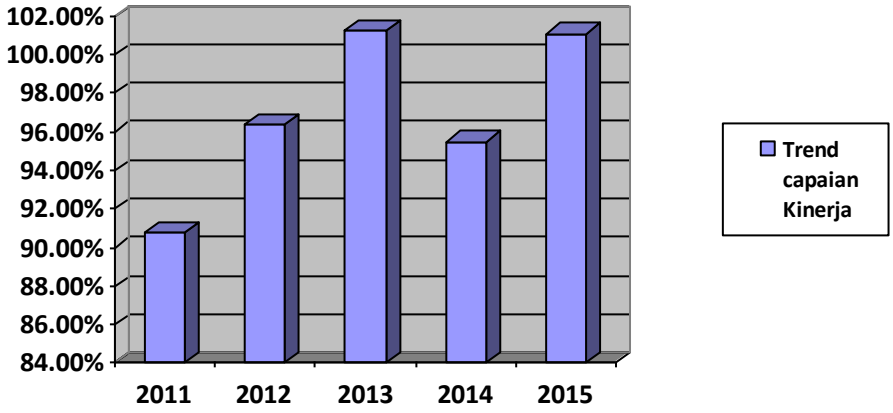

Sasaran 9:

Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir

Pencapaian target sasaran 9 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	82 Klp.	68 Klp.	82,93
2	Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan	2 Klp.	2 Klp.	100,00
3	Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	101 Klp.	101 Klp.	101,00
JUMLAH RATA-RATA				94,64

Pencapaian kinerja pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa 2 dua) indikator sasaran semuanya mecapai hasil optimal di atas ≥85,00%, yaitu:, Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan dan Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan. Namun terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang nilainya tidak optimal, yaitu jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan, nilai capaian 82,93%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan terbatasnya alokasi anggaran sehingga pemberian bantuan kepada nelayan tangkap tahun 2015 hanya sebanyak 68 kelompok atau berkurang 14 kelompok dari rencana/target yang ditetapkan.

Capaian tahun 2015 yaitu 94,64%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 100,00%, maka terjadi penurunan capaian tahun 2015 sebesar 5.36%.

Capaian realisasi kinerja sasaran 9 tersebut pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN	CAPAIAN

	2011	2012	2013	2014	2015
Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	100,25%	99,67 %	94,97%	100,00 %	94.64 %

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 9, yaitu **meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir** pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2011 dengan nilai capaian 100,25 %, capaian terendah tahun 2015 yaitu 94.64 %.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran 9 : Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir 5 Tahun terakhir

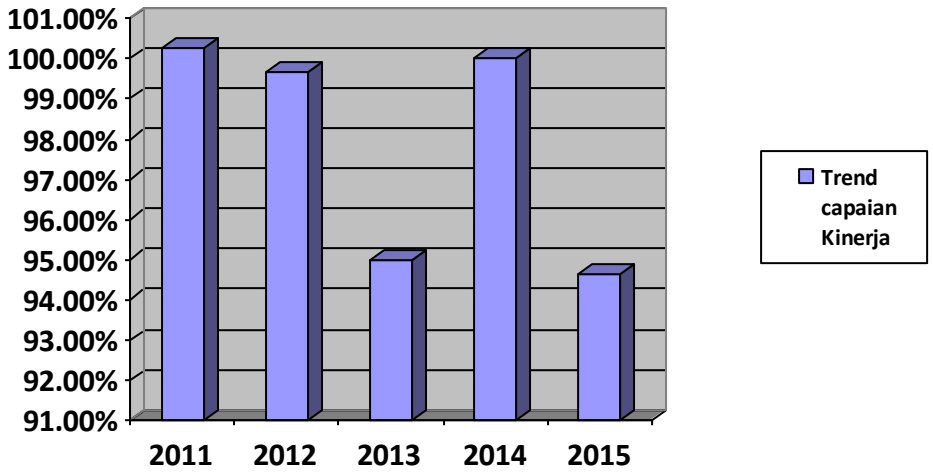

Sasaran 10:

Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya

Pencapaian target sasaran 10 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis AlQuran	100,00 %	100,00 %	100,00
2	Jumlah taman pengajian	137 TPQ	125 TPQ	92,59

	AlQuran			
3	Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	2 Kali	2 Kali	100,00
4	Persentase jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	100 %	100 %	100,00
5	Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100,00 %	100,00 %	100,00
6	Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate	10,00 %	10,39 %	103,94
7	Persentase situs budaya yang dilestarikan	40,74 %	44,44 %	109,09
JUMLAH RATA-RATA				100,80

Dari tabel tersebut menunjukan bahwa 7 (tujuh) indikator sasaran semuanya mencapai nilai optimal ≥85,00%, yaitu: persentase siswa SD kelas VI beragama islam dapat baca tulis AlQuran, jumlah taman pengajian AlQuran yang dibina, jumlah pertemuan forum antar umat beragama, persentase jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan, persentase sekolah dasar yang telah mengajar bahasa daerah Ternate, persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate, dan persentase situs budaya yang dilestarikan.

Capaian realisasi kinerja sasaran 10 tersebut diatas pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	100,84%	100,71%	122,06%	115,35%	100,80 %

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 10, yaitu **Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya** pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun

2014 dengan nilai capaian 115,35 %, capaian terendah tahun 2012 yaitu 100,71%. Capaian tahun 2015 yaitu 100,80%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 115,38%, maka terjadi penurunan capaian tahun 2015 sebesar 14.58%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran: Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya

5 Tahun terakhir

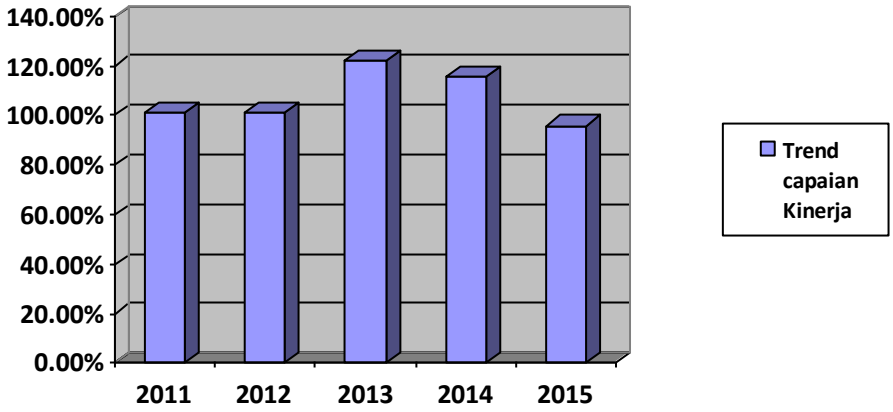

Sasaran 11:

Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah

Pencapaian target sasaran 11 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan	8 Perda	7 Perda	87,50
2	Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00
3	Perrsentase jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	100,00 %	100,00 %	100,00
JUMLAH RATA- RATA				95,84

Pada tabel tersebut terlihat bahwa 3 (tiga) indikator kinerja sasaran telah mencapai hasil optimal ≥85,00%, yaitu: jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan, persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan, dan jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani. Realisasi kinerja sasaran 11,

yaitu: **Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah** nilai capaian 95,838%

Capaian realisasi kinerja sasaran 11 tersebut diatas pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	94,33 %	87,50 %	97,78 %	102,38 %	95,84%

Dari tabel tersebut terlihat capaian kinerja sasaran 11, yaitu **Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah** pada 5 tahun terakhir fluktuatif. Capaian tertinggi yaitu pada tahun 2014 dengan nilai capaian 102,38 %, capaian terendah tahun 2012 yaitu 87,50%. Capaian tahun 2015 yaitu 95,84%, jika dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 102,38%, maka terjadi penurunan capaian tahun 2015 sebesar 6,54%.

Grafik Trend Capaian Kinerja Sasaran: Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah 5 Tahun terakhir

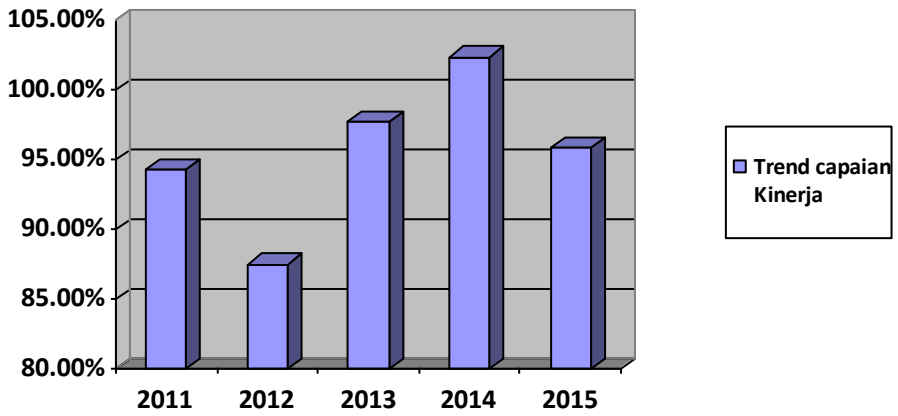

C. *TREND* CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate 5 Tahun terakhir fluktuatif yaitu sebagi berikut :

SASARAN	CAPAIAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	101.64%	91,02%	100.70%	92.83%	100,22%
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	102,74%	109.82%	105,39%	104.34%	95,50%
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	293.07%	104.14%	190.61%	93.98%	101.13%
Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	104.62%	100.00%	232.17%	102.92%	98,42%
Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	98.47%	99.81%	97.51%	99.33%	101.84%
Terwujudnya *good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	97.75%	99.37%	118.01%	124.74%	106.09%

Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	100.15%	103.41%	99.36%	107.40%	112.38%
Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	90.79%	96.35%	101.25%	95.48%	101.09%
Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	100.25%	99.67%	94.97%	100.00%	94.64%
Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	100.84%	100.71%	122,06%	115.35%	100,80%
Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	94.33%	87.50%	122,06%	115.35%	95,84%
JUMLAH RATA-RATA	116.78%	99,25%	123,62%	103,53%	100,72%

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa capaian rara-rata kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate 5 Tahun terakhir fluktuatif, capaian tertinggi tahun 2011 dengan nilai capaian rata-rata 116.78% dan terendah tahun 2012 nilai capaian rata-rata 99,25%.

Grafik Trend Rata-rata Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir

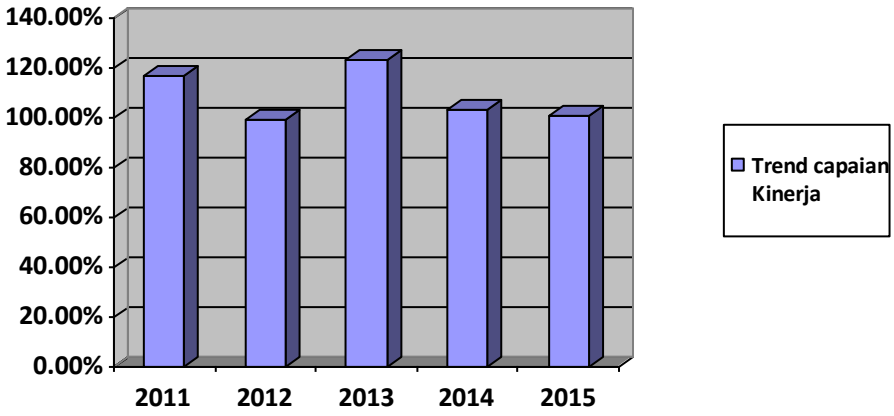

Dari grafik tersebut di atas, terlihat bahwa capaian kinerja sejak tahun 2011 s/d 2015 fluktuatif. Pada tahun 2011 nilai capaian 116,78%, tahun 2012 nilai capaian 99,26% atau terjadi penurunan sebesar 17.52% dari tahun 2011. Tahun 2013 nilai capaian 123,62% atau terjadi kenaikan sebesar 24,36% dari tahun 2012, capaian tahun 2014 sebesar 103,53% atau terjadi penurunan sebesar 20,09% dari tahun 2013., Tahun 2015 nilai capaian 100,72% atau terjadi penurunan sebesar 2.81% dari tahun 2014.

D. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapai sasaran strategis tahun 2015 adalah sebagai berikut:

URAIAN PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	756,375,280	595,723,416
Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19,076,811,717	18,874,934,385
Prog. Pendidikan Menengah	9,065,288,585	8,957,586,040
Prog. Pendidikan Non Formal	396,044,100	381,780,100
Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,231,101,670	1,213,563,670
Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan	4,709,691,500	4,675,975,726
Prog. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar	1,484,223,170	1,394,176,750
Prog. Penyediaan Biaya Operasional SD	822,000,000	821,015,039
Prog. Penyediaan Biaya Operasional SMP	1,367,809,000	1,278,789,625
Prog. Penyediaan Biaya Operasional SMA	2,682,297,840	2,599,127,590
Prog. Penyediaan Biaya Operasional & Adm. Balai Bahasa Daerah	993,511,390	976,905,790
Prog. Pendidikan Non Formal	467,975,630	415,020,170

Prog. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,962,295,160	1,716,758,299
Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat	2,239,788,000	1,766,681,273
Prog. Pengawasan Obat dan Makanan	156,284,720	156,159,660
Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	359,170,400	356,320,400
Prog. Perbaikan Gizi Masyarakat	700,514,200	592,285,228
Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat	274,954,785	274,374,085
Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	661,670,250	632,654,650
Prog. Standarisasi Pelayanan Kesehatan	160,000,140	150,797,140
Prog. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	56,430,000	51,600,000
Prog. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	6,167,683,900	5,742,585,782
Prog. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	986,000,000	888,195,000
Prog. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	166,787,980	165,542,980
Prog. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	718,320,510	522,576,370
Prog. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	922,574,944	656,933,640
Prog. Pembangunan Jalan dan Jembatan	20,390,207,245	19,677,650,703
Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3,867,645,144	3,831,709,000
Prog. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13,549,148,052	13,526,065,000
Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	1,421,046,024	1,403,267,000
Prog. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2,249,908,652	2,249,312,000
Prog. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	171,815,000	102,609,000
Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2,033,491,000	2,010,408,100
Prog. Pengendalian Banjir	682,669,052	661,511,965
Prog. Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	31,722,391,348	29,777,128,760
Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	688,994,298	648,075,000
Prog. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,239,822,000	1,220,544,000
Penyusunan dan Publikasi Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan Inflasi)	118,491,810	112,756,810
Penyusunan Profil Potensi Ekonomi Lokal Kota Ternate	99,099,790	98,599,790
Penyusunan dan Publikasi Dokumen Statistik Kota Ternate	119,265,510	118,765,510
Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Kota Ternate	148,049,880	138,649,880

Penyusunan Monografi Kota Ternate	99,998,800	93,023,800
Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11,812,123,610	11,601,321,145
Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	796,056,000	742,530,000
Prog. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	354,642,560	353,915,376
Prog. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	435,000,000	431,320,000
Prog. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	279,584,200	278,475,200
Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,066,396,600	1,060,568,000
Prog. Penataan Administrasi Kependudukan	880,919,890	869,657,800
Pendampingan Kelompok Usaha Perempuan Usaha Sirup Pala	23,000,000	23,000,000
Prog. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	574,392,600	508,406,600
Prog. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	240,498,250	238,590,000
Prog. Pembinaan Anak Terlantar	57,500,000	56,369,900
Prog. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	249,335,000	237,285,000
Prog. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	68,525,000	68,360,000
Prog. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	760,788,400	743,934,750
Prog. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	48,748,930	48,748,900
Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	158,552,330	158,481,330
Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	89,758,200	89,758,200
Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	224,278,650	220,082,815
Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	703,725,000	703,640,000
Prog. Pengelolaan Kekayaan Budaya	1,423,939,000	1,360,533,100
Prog. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kepariwisataan	226,450,000	226,450,000
Prog. Pengembangan Sarana Pariwisata	608,300,000	506,350,000
Prog. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1,477,502,515	1,468,150,125
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	40,000,000	39,915,000
Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1,228,729,500	1,228,606,400
Prog. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	205,840,000	205,665,000
Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	328,337,900	315,590,400
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	91,399,020	90,673,000

Prog. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	210,600,000	210,600,000
Prog. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	37,734,760	37,734,700
Prog. Penataan Peraturan Perundang-undangan	1,043,919,470	1,036,914,470
Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	1,715,661,300	1,671,117,300
Prog. Penyelenggaraan Keagamaan	5,259,464,520	4,716,979,695
Prog. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	273,674,680	263,404,680
Prog. Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	250,319,000	250,318,400
Belanja Bantuan Sosial	5,400,500,000	5,400,500,000
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT)	779,750,000	726,705,000
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Non PKPT)	398,500,000	317,750,000
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	140,000,000	138,675,000
Rapat Pra Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Kota Ternate	274,854,890	261,500,000
Rapat Pra Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Provinsi	21,700,000	19,499,200
Rapat Pra Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional	92,000,000	87,814,000
Prog. Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	963,205,080	951,223,580
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Kota Ternate Utara	495,323,750	495,323,750
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Kota Ternate Selatan	500,000,000	499,780,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Pulau Ternate	480,000,000	480,000,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Pulau Moti	200,000,000	200,000,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Kota Ternate Tengah	420,000,000	420,000,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Pulau Batang Dua	200,000,000	200,000,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Pulau Hiri	200,000,000	200,000,000
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Kota Ternate Utara	72,227,900	72,227,900
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Kota Ternate Selatan	75,562,950	75,562,750
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Ternate	74,999,960	74,999,960
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Moti	85,434,500	85,434,500
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Kota Ternate Tengah	74,999,740	74,999,740
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Batang Dua	74,860,670	74,860,670
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Hiri	74,853,840	74,853,840

Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,910,728,520	2,899,671,170
Prog. Pendidikan Kedinasan	272,790,000	271,260,000
Prog. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4,212,287,695	4,140,405,080
Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	640,317,085	526,922,035
Prog. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	123,950,000	115,243,400
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	10,830,101,280	10,828,834,480
Prog. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	484,567,950	481,440,600
Prog. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	397,978,982	397,370,000
Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	219,551,340	214,997,330
Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	129,265,950	128,077,990
Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1,057,104,640	1,050,400,150
Prog. Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	49,999,380	49,919,380
Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1,210,809,300	1,194,892,800
Prog. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	963,771,755	948,092,400
Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	29,990,710	29,990,095
Prog. Peningkatan Kesejahteraan Petani	135,580,870	134,818,973
Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	29,849,170	28,830,725
Prog. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	350,549,245	332,984,530
Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	64,147,572	62,956,360
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	699,300,180	694,490,480
Prog. Pengembangan Budidaya Perikanan	325,200,000	323,379,000
Prog. Pengembangan Perikanan Tangkap	6,814,477,896	6,806,857,880
Prog. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	7,800,000	5,500,000
Prog. Pengembangan Sarana dan Prasarana	922,016,043	921,031,000
Prog. Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan	167,481,281	161,313,080
Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1,052,700,000	1,048,322,000
Prog. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	772,970,000	751,318,900
Prog. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	50,108,850	46,178,850
Prog. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100,352,600	96,302,600

Prog. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	609,450,000	607,050,000
Prog. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	19,725,000	19,285,000
Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	6,821,307,000	5,526,533,000
Prog. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	25,016,000	24,566,000
Prog. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	112,750,000	111,120,000
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	16,375,000	16,375,000
Total Anggaran Program	**224,162,489,935**	**215,520,026,590**

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Pemerintah Kota Ternate sesuai evaluasi hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun2015 berada pada katagori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata capaian kinerja indikator sasaran tahun 2015 yaitu sebesar **100,72%.** Dari 11 (sebelas) sasaran pada penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2015, semuanya mencapai hasil optimal ≥ 85%.Jumlah indikator kinerja sasaran tahun 2015sebanyak 82 indikator, 74(tujuh puluh empat) indikator sasaran (90,24%) mencapai nilai optimal ≥85,00% dan hanya 8(delapan) indikator sasaran(9,76%) yang nilai capaiannya kurang optimal <85,00%, yaitu:

1. Angka partisipasi kasar, nilai capaian rata-rata 79,74%;
2. Angkakematian kasar (per 100.000 penduduk), nilai capaian 77,22%;
3. Angka kesembuhan penderitaTB Paru, nilai capaian 84,62%;
4. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, nilai capaian 62,54%;
5. Persentase Kecamatan bebas rawan gizi, nilai capaian 71,42%;
6. Rasio penderita Malaria terhadap jumlah penduduk (*Annual Malaria Incidence* dan *Annual parasite incidence*), nilai capaian 37,26%;
7. Persentase PNS yang diberikan sanksi berat, nilai capaiannya 53,06%;
8. Jumlah kelompok nelayantangkap yang memperolehbantuan, nilaicapaian 82,93%.

Kelemahan tersebut diatas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun2015, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance.*

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

WALIKOTA TERNATE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.
Jabatan : WALIKOTA TERNATE

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ternate, 23 Maret 2015

WALIKOTA TERNATE

Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA TERNATE

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	3	4
Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	55.68 %
	2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	90.00 %
	3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	66.67 %
Meningkatnya derajat pendidikan masyaratakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	1 Indeks Pembangunan Manusia	78.44 %
	2 Angka melek huruf seluruh penduduk	100.00 %
	3 Nilai UN dan UAS rata-rata	
	- Nilai UN rata-rata SD	5.50
	- Nilai UAS rata-rata SD	7.50
	- Nilai UN rata-rata SLTP	5.50
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8.00
	- Nilai UN rata-rata SLTA	5.50
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8.00
	- Nilai UN rata-rata paket A	5.00
	- Nilai UAS rata-rata paket A	7.00
	- Nilai UN rata-rata paket B	5.00
	- Nilai UAS rata-rata paket B	6.50
	- Nilai UN rata-rata paket C	5.00
	- Nilai UAS rata-rata paket C	7.00
	4 Angka kelulusan	
	- SD	100.00 %
	- SLTP	100.00 %
	- SLTA	100 %
	5 Angka putus sekolah	
	- SD	0.06
	- SLTP	0.07
	- SLTA	0.09
	6 Angka rata-rata lama sekolah	
	- SD	6 Tahun
	- SLTP	3 Tahun
	- SLTA	3 Tahun
	7 Angka partisipasi murni	
	- SD	97.31 %
	- SLTP	86.91 %
	- SLTA	82.62 %
	8 Angka partisipasi kasar	
	- SD	105.79 %
	- SLTP	99.74 %
	- SLTA	94.73 %
	9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		- SD	1 : 203 %
		- SLTP	1 : 133 %
		- SLTA	1 : 286 %
		10 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1 : 32
		11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 32
		12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 32
		13 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1 : 20
		14 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 20
		15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 20
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1 Angka usia harapan hidup	71 Tahun
		2 Angka prevalensi penyakit	
		- Malaria	< 1 ‰
		- TBC	221/100.000 Pddk
		- DBD	3 ‰
		- HIV	0,1/1.000 Pddk
		3 Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk)	
		- Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000 Pddk
		- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000 Pddk
		- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk
		- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000 Pddk
		4 Angka kesembuhan penderita TB paru	65.00 %
		5 Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000 KH
		6 Angka kematian balita	5/1.000 KH
		7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	90/100.000 KH
		8 Persentase balita gizi buruk	2.00 %
		9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	17 : 100.000 Pddk
		10 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	10 : 100.000 Pddk
		11 Rasio bidan per 100.000 penduduk	150 : 100.000 Pddk
		12 Rasio perawat per 100.000 penduduk	235 : 100.000 Pddk
		13 Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 60 Balita
		14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 30.000 Pddk
		15 Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 Pddk
		16 Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100.00 %
		17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam	100.00 %
		18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100.00 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	91.00 %
		20 Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk	
		- *Annual Malaria Incidence* (AMI)	19.00 ‰
		- *Annual Parasite Incidence* (API)	< 1 ‰
4	Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja	46.19 %
		2 Rasio belanja modal terhadap total belanja	19.84 %
		3 Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100.00 %
		4 Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP	100.00 %
		5 Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	25.34 %
		6 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan	
		- MCK Komunal	12.50 %
		- Drainase /gorong-gorong	12.17 %
		- Jalan lingkungan	17.02 %
		7 Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100.00 %
		8 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30 KK
5	Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	1 Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata	12 lokasi
		2 Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	70.00 %
		3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	10.00 %
		4 Jumlah tempat pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi	2 lokasi
6	Terwujudnya *good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	7.66 %
		2 Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0.08 %
		3 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100.00 %
		4 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	40.00 %
7	Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	1 Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	3 Klp.
		2 Nilai modal kerja dan investasi UKM	899,251,416,220.00 Rp
		3 Nilai omzet UKM	2,327,137,548,272.00 Rp

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		4 Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	38 Klp.
		5 Tingkat pengangguran terbuka	8.72 %
		6 Pendapatan perkapita	7,623,797.00 Rp
		7 Laju pertumbuhan ekonomi	7.60 %
		8 Tingkat Inflasi	9.34 %
8	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	1 Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	6 SKPD
		2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya	14 jenis
		3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	11 Tempat
		4 Rasio penduduk ber-KTP	1 : 0,62
		5 Rasio penduduk ber-KK	1 : 0,62
		6 Rasio bayi ber-akte kelahiran	1 : 0,60
		7 Persentase ketersediaan armada sampah	77.08 %
9	Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	1 Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	82 Klp.
		2 Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan	1 Klp.
		3 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	59 Klp.
10	Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	1 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran	100.00 %
		2 Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina	135 TPQ
		3 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	4 Kali
		4 Persentase PSK terjaring yang diberikan pembinaan	100 %
		5 Menurunnya pertumbuhan PMKS	15.00 %
		6 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100.00 %
		7 Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate	10.00 %
		8 Persentase situs budaya yang dilestarikan	40.74 %
11	Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	1 Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	8 Perda
		2 Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
		3 Persentase jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani	100 %

Program	Anggaran
Prog. Pendidikan Anak Usia Dini	756,375,280
Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	18,876,868,757
Prog. Pendidikan Menengah	9,065,288,585
Prog. Pendidikan Non Formal	453,685,060
Prog. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1,278,712,780
Prog. Manajemen Pelayanan Pendidikan	4,863,436,640
Prog. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar	1,522,119,170
Prog. Penyediaan Biaya Operasional SD	822,000,000
Prog. Penyediaan Biaya Operasional SMP	1,367,809,000
Prog. Penyediaan Biaya Operasional SMA	2,670,197,840
Prog. Penyediaan Biaya Operasional & Adm. Balai Bahasa Daerah	993,511,390
Prog. Pendidikan Non Formal	499,975,630
Prog. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1,842,295,160
Prog. Upaya Kesehatan Masyarakat	3,265,683,500
Prog. Pengawasan Obat dan Makanan	156,284,720
Prog. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	229,738,500
Prog. Perbaikan Gizi Masyarakat	392,388,570
Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat	205,688,785
Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	395,064,400
Prog. Standarisasi Pelayanan Kesehatan	160,000,140
Prog. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	56,430,000
Prog. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	6,071,483,900
Prog. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	986,000,000
Prog. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	166,787,980
Prog. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	718,320,510
Prog. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	922,574,944
Prog. Pembangunan Jalan dan Jembatan	26,732,590,519
Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	3,628,788,744
Prog. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	13,889,155,570
Prog. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	1,421,046,024
Prog. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	2,049,908,652
Prog. Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	171,815,000
Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	2,033,491,000
Prog. Pengendalian Banjir	582,634,700
Prog. Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	28,860,925,174
Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	676,124,298
Prog. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1,191,961,000
Penyusunan dan Publikasi Data Pokok Perencanaan Kota Ternate (PDRB dan Inflasi)	118,491,810
Penyusunan Profil Potensi Ekonomi Lokal Kota Ternate	99,099,790
Penyusunan dan Publikasi Dokumen Statistik Kota Ternate	119,265,510
Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Kota Ternate	148,049,880

Program	Anggaran
Penyusunan Monografi Kota Ternate	99,998,800
Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11,125,823,610
Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,006,056,000
Prog. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	364,642,560
Prog. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	500,000,000
Prog. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	279,584,200
Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	791,396,600
Prog. Penataan Administrasi Kependudukan	945,313,500
Pendampingan Kelompok Usaha Perempuan Usaha Sirup Pala	23,000,000
Prog. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	574,392,600
Prog. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	240,498,250
Prog. Pembinaan Anak Terlantar	57,500,000
Prog. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	199,335,000
Prog. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	68,525,000
Prog. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	760,788,400
Prog. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	48,748,930
Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	332,409,985
Prog. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	89,758,200
Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	278,428,470
Prog. Pengembangan Pemasaran Pariwisata	628,775,000
Prog. Pengelolaan Kekayaan Budaya	1,363,189,000
Prog. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kepariwisataan	226,450,000
Prog. Pengembangan Sarana Pariwisata	608,300,000
Prog. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1,127,502,515
Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	40,000,000
Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1,156,729,500
Prog. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	205,840,000
Prog. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1,928,152,670
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	99,999,020
Prog. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	243,237,900
Prog. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	43,734,760
Prog. Penataan Peraturan Perundang-undangan	943,919,470
Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	332,765,300
Prog. Penyelenggaraan Keagamaan	5,259,464,520
Prog. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	273,674,680
Prog. Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	250,319,000
Belanja Bantuan Sosial	5,000,500,000
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (PKPT)	779,750,000
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Non PKPT)	422,500,000
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	140,000,000
Rapat Pra Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Kota Ternate	274,854,890
Rapat Pra Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Provinsi	21,700,000
Rapat Pra Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional	92,000,000
Prog. Pengembangan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1,061,205,080
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Kota Ternate Utara	495,323,750
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Kota Ternate Selatan	500,000,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Pulau Ternate	480,000,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Pulau Moti	200,000,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Kota Ternate Tengah	420,000,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Pulau Batang Dua	200,000,000
Penyediaan Dana Partisipatif Kec. Pulau Hiri	200,000,000

Program	Anggaran
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Kota Ternate Utara	72,227,900
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Kota Ternate Selatan	75,562,950
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Ternate	74,999,960
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Moti	85,434,500
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Kota Ternate Tengah	74,999,740
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Batang Dua	74,860,670
Penunjang Pengikutsertaan STQ Tingkat Kota Ternate Kec. Pulau Hiri	74,853,840
Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2,477,987,870
Prog. Pendidikan Kedinasan	272,790,000
Prog. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	3,982,128,435
Prog. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Kelurahan	640,317,085
Prog. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan	123,950,000
Prog. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	10,830,101,280
Prog. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	484,567,950
Prog. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	397,978,982
Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	219,551,340
Prog. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	129,265,950
Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1,057,104,640
Prog. Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	49,999,380
Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1,210,809,300
Prog. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	963,771,755
Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	29,990,710
Prog. Peningkatan Kesejahteraan Petani	135,580,870
Prog. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	29,849,170
Prog. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	350,549,245
Prog. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	64,147,572
Prog. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	699,300,180
Prog. Pengembangan Budidaya Perikanan	325,200,000
Prog. Pengembangan Perikanan Tangkap	6,251,855,920
Prog. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	7,800,000
Prog. Pengembangan Sarana dan Prasarana	811,759,380
Prog. Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan	167,481,290
Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	957,700,000
Prog. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	712,970,000
Prog. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	50,108,850
Prog. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	100,352,600
Prog. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	609,450,000
Prog. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	19,725,000
Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4,821,307,000
Prog. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	25,016,000
Prog. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	112,750,000
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	16,375,000

Ternate, 23 Maret 2015
WALIKOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE

Dr. H. BURHAN ABDURAHMAN, S.H., M.M.

LAMPIRAN
PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Pemerintah Kota Ternate
Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1 Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan	1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan	60,96 %	61,37 %	100,68
	2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih	90,00 %	90,00 %	100,00
	3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN	66,67 %	66,67 %	100,00
2 Meningkatnya derajat pendidikan masyaratakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik	1 Indeks Pembangunan Manusia	78,44 %	80,25 %	102,31
	2 Angka melek huruf seluruh penduduk	100,00 %	100,00 %	100,00
	3 Nilai UN dan UAS rata-rata			
	- Nilai UN rata-rata SD	5,50	6,00	109,09
	- Nilai UAS rata-rata SD	7,50	7,50	100,00
	- Nilai UN rata-rata SLTP	5,50	6,00	109,09
	- Nilai UAS rata-rata SLTP	8,00	8,00	100,00
	- Nilai UN rata-rata SLTA	5,50	6,00	109,09
	- Nilai UAS rata-rata SLTA	8,00	8,00	100,00
	- Nilai UN rata-rata paket A	5,00	5,00	100,00
	- Nilai UAS rata-rata paket A	7,00	7,00	100,00
	- Nilai UN rata-rata paket B	5,00	5,00	100,00
	- Nilai UAS rata-rata paket B	6,50	6,50	100,00
	- Nilai UN rata-rata paket C	5,00	5,00	100,00
	- Nilai UAS rata-rata paket C	7,00	7,00	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	4 Angka kelulusan			
	- SD	100,00 %	100,00 %	100,00
	- SLTP	100,00 %	100,00 %	100,00
	- SLTA	100,00 %	100,00 %	100,00
	5 Angka putus sekolah			
	- SD	0,06	0,07	116,67
	- SLTP	0,07	0,08	114,29
	- SLTA	0,09	0,09	100,00
	6 Angka rata-rata lama sekolah			
	- SD	6 Tahun	6 Tahun	100,00
	- SLTP	3 Tahun	3 Tahun	100,00
	- SLTA	3 Tahun	3 Tahun	100,00
	7 Angka partisipasi murni			
	- SD	97,31 %	89,07 %	91,53
	- SLTP	86,91 %	72,39 %	83,29
	- SLTA	82,62 %	70,02 %	84,75
	8 Angka partisipasi kasar			
	- SD	105,79 %	98,11 %	92,74
	- SLTP	99,74 %	72,39 %	72,58
	- SLTA	94,73 %	70,02 %	73,92
	9 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah			
	- SD	1 : 203 %	1 : 164 %	85,17
	- SLTP	1 : 133 %	1 : 177 %	122,80
	- SLTA	1 : 286 %	1 : 273 %	96,24
	10 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD	1 : 32	1 : 27	94,57
	11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 32	1 : 27	94,57
	12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 32	1 : 30	97,83
	13 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD	1 : 20	1 : 15	93,75

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	14	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP	1 : 20	1 : 12	90,00
	15	Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA	1 : 20	1 : 13	91,25
3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup	71 Tahun	70 Tahun	98,59
	2	Angka prevalensi penyakit			
		- TBC	221/100.000 Pddk	225/100.000 Pddk	98,22
		- DBD	3 ‰	2,3 ‰	130,43
		- HIV	0,01/1.000 Pddk	0,01/1.000 Pddk	100,00
	3	Angka kematian kasar (per 100.000 penduduk)			
		- Karena penyakit Malaria	< 2 per 100.000 Pddk	5 per 100.000 Pddk	38,00
		- Karena penyakit TBC	< 2 per 100.000 Pddk	4,7 per 100.000 Pddk	40,43
		- Karena penyakit DBD	< 2 per 100.000 Pddk	2,2 per 100.000 Pddk	86,36
		- Karena penyakit HIV	<5 per 100.000 Pddk	3,4 per 100.000 Pddk	144,12
	4	Angka kesembuhan penderita TB paru	65,00 %	55,00 %	84,62
	5	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	7/1.000 KH	6,71/1.000 KH	97,17
	6	Angka kematian balita	2/1.000 KH	0,95/1.000 KH	221,05
	7	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	90/100.000 KH	143,9/100.000 KH	62,54
	8	Persentase balita gizi buruk	2,00 %	0,8 %	160,00
	9	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	17 : 100.000 Pddk	16 : 100.000 Pddk	94,12
	10	Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk	10 : 100.000 Pddk	9 : 100.000 Pddk	90,00
	11	Rasio bidan per 100.000 penduduk	130 : 100.000 Pddk	120 : 100.000 Pddk	92,31
	12	Rasio perawat per 100.000 penduduk	235 : 100.000 Pddk	211 : 100.000 Pddk	89,79
	13	Rasio Posyandu terhadap balita	1 : 75 Balita	1 : 86 Balita	87,21
	14	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	1 : 30.000 Pddk	1 : 20.272 Pddk	147,99

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	15 Rasio Pustu per satuan penduduk	1 : 15.000 Pddk	1 : 14.480 Pddk	103,59
	16 Persentase kecamatan bebas rawan gizi	100,00 %	71,42 %	71,42
	17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam	100,00 %	100,00 %	100,00
	18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan	100,00 %	100,00 %	100,00
	19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan	91,00 %	89,36 %	98,20
	20 Rasio pederita malaria terhadap jumlah penduduk			
	- *Annual Malaria Incidence* (AMI)	19,00 ‰	29,00 ‰	65,52
	- *Annual Parasite Incidence* (API)	< 1 ‰	10,00 ‰	9,00
4 Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat	1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja	46,19 %	45,10 %	97,63
	2 Rasio belanja modal terhadap total belanja	19,84 %	18,14 %	91,43
	3 Persentase realisasi dana partisipatif kecamatan	100,00 %	99,99 %	99,99
	4 Persentase realisasi dana cost sharing PNPM MP	100,00 %	94,06 %	94,06
	5 Persentase peningkatan Dana Pembangunan Kelurahan	25,34 %	25,56 %	100,87
	6 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan			
	- MCK Komunal	18,63 %	18,63 %	100,00
	- Drainase /gorong-gorong	14,79 %	16,91 %	114,33
	- Jalan lingkungan	43,63 %	43,90 %	100,61
	7 Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda	100,00 %	99,00 %	99,00
	8 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah	30 KK	30 KK	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5 Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu	1 Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata	12 lokasi	12 lokasi	100,00
	2 Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan	70,00 %	77,78 %	111,11
	3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan	20,00 %	19,25 %	96,25
	4 Jumlah tempat pedagang kaki lima di pusat kota yang direlokasi	2 lokasi	2 lokasi	100,00
6 Terwujudnya *good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat	1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan	7,66 %	12,85 %	167,75
	2 Persentase PNS yang diberikan sanksi berat	0,08 %	0,12 %	53,06
	3 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu	100,00 %	100,00 %	100,00
	4 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK	40,00 %	41,415 %	103,54
7 Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.	1 Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha	3 Klp.	3 Klp.	100,00
	2 Nilai modal kerja dan investasi UKM	899.251.416.220,00 Rp	925.881.416.220,00 Rp	102,96
	3 Nilai omzet UKM	2.327.137.548.272,00 Rp	2.445.971.048.270,00 Rp	105,11
	4 Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan	38 Klp.	38 Klp.	100,00
	5 Tingkat pengangguran terbuka	8,72 %	6,87 %	121,22
	6 Pendapatan perkapita	30.007.344,00 Rp	33.534.337,00 Rp	111,75
	7 Laju pertumbuhan ekonomi	7,60 %	8,08 %	106,32
	8 Tingkat Inflasi	9,34 %	4,51 %	151,71

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8	Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas	1 Jumlah SKPD pelayanan publik yang telah memiliki SOP	6 SKPD	6 SKPD	100,00
		2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya	14 jenis	16 Jenis	114,29
		3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai	11 Tempat	11 Tempat	100,00
		4 Rasio penduduk ber-KTP	1 : 0,62	1 : 0,69	100,12
		5 Rasio penduduk ber-KK	1 : 0,62	1 : 0,91	100,48
		6 Rasio bayi ber-akte kelahiran	1 : 0,60	1 : 0,39	99,65
		7 Persentase ketersediaan armada sampah	77,08 %	72,00 %	93,41
9	Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir	1 Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan	82 Klp.	68 Klp.	82,93
		2 Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan	2 Klp.	2 Klp.	100,00
		3 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan	100 Klp.	101 Klp.	101,00
10	Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya	1 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran	100,00 %	100,00 %	100,00
		2 Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina	135 TPQ	125 TPQ	92,59
		3 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama	2 Kali	2 Kali	100,00
		4 Persentase PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan	100,00 %	100,00 %	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	5 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate	100,00 %	100,00 %	100,00
	6 Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran seni budaya Ternate	10,00 %	10,39 %	103,94
	7 Persentase situs budaya yang dilestarikan	40,74 %	44,44 %	109,09
11 Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah	1 Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan	8 Perda	7 Perda	87,50
	2 Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan	100,00 %	100,00 %	100,00
	3 Persentase jumlah kasus pelanggaranPerda yang dapat	100,00 %	100,00 %	100,00

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015 224.162.489.935,00
JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 215.520.026.590,00

PEMERINTAH KOTA TERNATE

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015